

**PERAN DAN FUNGSI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI (PPP)**

**MAYANGAN KOTA PROBOLINGGO JAWA TIMUR**

**SKRIPSI**

**PROGRAM STUDI SOSIAL EKONOMI PERIKANAN**

**JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN DAN KELAUTAN**

Oleh

**YANNES NATHANAEL PASALBESSY**

**NIM. 0710843005**



**FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**MALANG**

**2011**

**PERAN DAN FUNGSI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI (PPP)**

**MAYANGAN KOTA PROBOLINGGO JAWA TIMUR**

**SKRIPSI**

**PROGRAM STUDI SOSIAL EKONOMI PERIKANAN**

**JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN DAN KELAUTAN**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana**

**Perikanan**

**di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan**

**Universitas Brawijaya**

**Oleh**

**YANNES NATHANAEL PASALBESSY**

**NIM. 0710843005**



**FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**MALANG**

**2011**

**PERAN DAN FUNGSI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI (PPP)  
MAYANGAN KOTA PROBOLINGGO JAWA TIMUR**

Oleh :

**YANNES NATHANAEL PASALBESSY**

**NIM. 0710843005**

Telah dipertahankan di depan penguji  
pada tanggal 20 Juli 2011  
dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui,

Dosen Penguji I

**(Dr. Ir. Anthon Efani, MP)**  
NIP. 19650717 199103 1 006  
Tanggal :

Dosen Pembimbing I

**(Dr. Ir. Pudji Purwanti, MP)**  
NIP. 19640228 198903 2 011  
Tanggal :

Dosen Penguji II

**(Erlinda Indrayani. S.Pi, M.Si)**  
NIP. 19740220 200312 2 001  
Tanggal :

Dosen Pembimbing II

**(Dr. Ir. Ismadi, MS)**  
NIP. 19490515 197802 1 001  
Tanggal :

Mengetahui  
Ketua Jurusan

**(Dr. Ir. Nuddin Harahap, MP)**  
NIP. 19610417 19902 1 001  
Tanggal :

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil penjiplakan (plagiasi), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

Malang, Juli 2011

Mahasiswa

---

Yannes Nathanael Pasalbessy

## RINGKASAN

---

**YANNES N PASALBESSY.** Laporan Skripsi tentang peran dan fungsi pelabuhan perikanan pantai (ppp) mayangan kota probolinggo jawa timur. (dibawah bimbingan **Dr. Ir. Pudji Purwanti, MP dan Dr. Ir. Ismadi, MS**).

---

Peran dan fungsi pelabuhan perikanan pantai sangat diperlukan dalam mengatur dan memfasilitasi kegiatan perikanan tangkap di wilayahnya, sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat nelayan di pesisir pantai Mayangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Mekanisme kerja Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan, peran dan fungsi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan dalam pengembangan kegiatan perikanan nelayan, dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan dalam peningkatan peran dan fungsi pelabuhan.

Penelitian ini dilakukan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan Kota Probolinggo, Jawa Timur pada bulan Pebruari sampai bulan Maret 2011.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi: Peneliti adalah sebagai penambah wawasan, pengetahuan dan sebagai bahan untuk penelitian lebih lanjut, Peguruan tinggi dan kalangan akademis adalah sebagai bahan referensi sehingga bisa digunakan sebagai referensi dasar untuk penelitian lebih lanjut, Instansi terkait adalah sebagai bahan untuk pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan usaha disektor perikanan, Pemerintah adalah sebagai bahan untuk pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus menggunakan teknik penentuan sampel *purposive sampling*. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yang digunakan untuk menganalisa peran dan fungsi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan.

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan memiliki luas lahan 20 Ha. Di dalam pengelolaan PPP Mayangan digunakan perundang-undangan dan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.06/MEN/2007 jo Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.19/MEN/2008 tanggal 06 oktober 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan, maka Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan termasuk dalam golongan pelabuhan yang diusahakan. Pelabuhan perikanan bertugas melaksanakan fasilitasi produksi dan pemasaran hasil perikanan di wilayahnya, pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan dan pelestariannya, dan kelancaran kegiatan kapal perikanan, serta pelayanan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan.

Dalam mekanisme kerja, hubungan kelembagaan antara instansi sangat dibutuhkan guna terciptanya sistem pengelolaan pelabuhan yang baik. Hubungan kelembagaan PPP Mayangan masih kurang berjalan dengan baik karena masih belum lengkapnya instansi yang terkait dalam pengelolaan pelabuhan perikanan. Sedangkan mekanisme kerja dari kegiatan bongkar muat kapal yaitu pemilik (juragan darat) sebagai pemimpin dan membawahi juragan

laut (nahkoda) sedangkan juragan laut/nahkoda membawahi 1 KKM/bagian mesin dan 6-8 anak buah kapal. setelah perahu berlabuh maka proses pembongkaran dilakukan oleh ABK. Setelah itu hasil ditaruh dikeranjang oleh manol/tenaga pengangkut diangkut dan ditimbang. Proses penimbangan ini diawasi langsung oleh perwakilan dari juragan darat (orang yang dipercaya langsung oleh pemilik kapal). Proses penimbangan dilakukan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Kenyataan yang terjadi di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan proses penjualan hasil melaut tidak melalui pelelangan melainkan terjadi kesepakatan terlebih dahulu dengan pedagang/tengkulak sebelum berangkat melaut, sehingga hasil laut setelah dilakukan proses penimbangan langsung dibawa oleh pedagang/ tengkulak tersebut

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan memiliki peran sebagai terminal penghubung kegiatan usaha di laut dan di darat ke dalam suatu sistem usaha yang berdaya guna tinggi yang meliputi peran pelabuhan sebagai pusat aktivitas produksi, sebagai pusat aktivitas distribusi, dan sebagai pusat kegiatan masyarakat nelayan sudah berjalan baik. Sedangkan fungsi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan dalam pengembangan kegiatan perikanan masyarakat nelayan masih belum optimal dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelabuhan perikanan karena masih ada beberapa fungsinya yang belum dilaksanakan.

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.06/MEN/2007 jo Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.19/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan yang mengatur tentang fungsi dari pelabuhan perikanan maka perlu dilakukan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan yang belum ada agar peran dan fungsi pelabuhan dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Seperti fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang yang meliputi pabrik es, fasilitas docking (galangan) kapal, fasilitas bengkel kapal, pembangunan dermaga 2, dan melakukan pengerukan pada tempat yang mengalami sedimentasi. Hubungan kelembagaan dalam pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan juga harus ditingkatkan agar peran dan fungsi pelabuhan dapat berjalan dengan baik seperti hubungan kelembagaan dengan Dinas Kebersihan kota Probolinggo dalam menjaga kebersihan lingkungan pelabuhan, meningkatkan hubungan dengan pengusaha swasta dalam penggunaan fasilitas yang mendukung kegiatan perikanan tangkap di pelabuhan. UPTD pada Tempat Pelelangan Ikan (TPI) harus segera menerapkan sistem pelelangan murni pada hasil tangkapan nelayan agar harga tidak berasal dari juragan dengan satu tengkulak saja, sehingga harga jual ikan yang didapat oleh nelayan dapat maksimal. Selain itu untuk menjaga kebersihan di lingkungan pelabuhan maka harus memindahkan pasar sementara yang di bangun di dalam pelabuhan.

## KATA PENGANTAR

Segala puji, segala hormat, segenap hati dan penyembahan kepada Tuhan, atas hikmat dan marifat sehingga dapat menyajikan Laporan Skripsi yang berjudul **Peran Dan Fungsi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan Kota Probolinggo Jawa Timur**. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang mekanisme kerja Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan, peran dan fungsi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan dalam pengembangan kegiatan perikanan nelayan, dan pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan dalam peningkatan peran dan fungsi pelabuhan.

Sangat disadari bahwa dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki penulis, walaupun telah dikerahkan segala kemampuan untuk lebih teliti, tetapi masih dirasakan banyak kekurangatepatan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran yang membangun agar tulisan ini bermanfaat dan dapat memberikan informasi bagi yang membutuhkan.

Malang, Juli 2011

Penulis

DAFTAR ISI

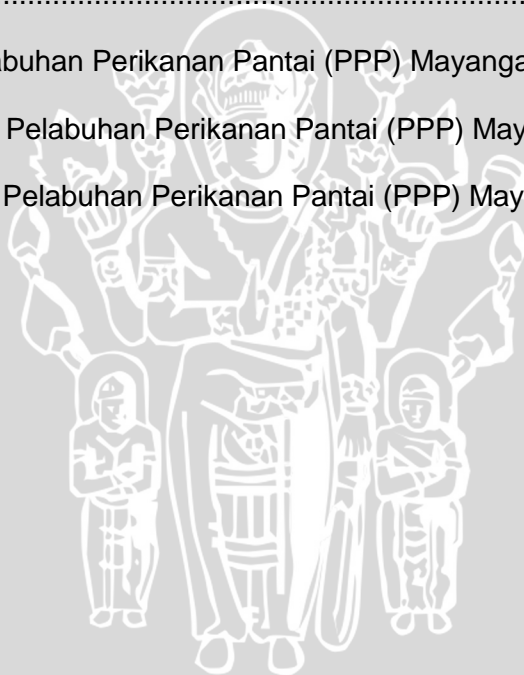
|   |      |
|---|------|
| <b>RINGKASAN</b> .....  | i    |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                                     | iii  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....   | iv   |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....                                       | vi   |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....                                      | vii  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....                                    | viii |
| <b>1. PENDAHULUAN</b> .....                                     | 1    |
| 1.1 Latar Belakang .....  | 1    |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                                       | 3    |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....                                     | 4    |
| 1.4 Kegunaan Penelitian .....                                   | 4    |
| <b>2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....                                | 5    |
| 2.1 Pelabuhan Perikanan .....                                   | 5    |
| 2.1.1 Pengertian Pelabuhan Perikanan .....                      | 5    |
| 2.1.2 Klasifikasi Pelabuhan Perikanan .....                     | 5    |
| 2.1.3 Fungsi Pelabuhan Perikanan .....                          | 8    |
| 2.2 Pengertian Manajemen Dan Fungsi Manajemen .....             | 10   |
| 2.3 Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Sumber Daya Manusia ..... | 11   |
| 2.3.1 Sumber Daya Manusia .....                                 | 11   |
| 2.3.2 Manajemen Sumber Daya Manusia .....                       | 11   |
| 2.4 Tenaga Kerja .....  | 12   |
| 2.5 Mekanisme Dan Hubungan Kerja .....                          | 13   |
| 2.6 Perikanan Tangkap .....                                     | 14   |
| 2.7 Kerangka Penelitian .....                                   | 15   |
| <b>3. METODE PENELITIAN</b> .....                               | 18   |
| 3.1 Lokasi ,Waktu, Dan Obyek Penelitian .....                   | 18   |
| 3.2 Jenis Penelitian .....                                      | 18   |
| 3.3 Jenis Dan Sumber Data .....                                 | 19   |
| 3.4 Teknik Pengumpulan Data .....                               | 21   |
| 3.5 Populasi Dan Sampel .....                                   | 22   |
| 3.5.1 Populasi .....  | 22   |
| 3.5.2 Sampel .....  | 22   |
| 3.6 Analisi Data .....  | 24   |
| <b>4. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b> .....                  | 26   |
| 4.1 Letak Geografis Dan Topografis .....                        | 26   |



|  |           |
|--|-----------|
| 4.2 Penduduk.....  | 27        |
| 4.3 Kegiatan Perikanan Tangkap .....   | 29        |
| 4.3.1 Jenis Dan Jumlah Alat Tangkap .....  | 29        |
| 4.3.2 Produktivitas Perikanan .....  | 30        |
| 4.3.2 Jumlah Nelayan.....  | 31        |
| <b>5. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>   | <b>32</b> |
| 5.1 Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan .....  | 32        |
| 5.2 Mekanisme Kerja di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan .....   | 34        |
| 5.2.1 Landasan Hukum .....   | 34        |
| 5.2.2 Hubungan Kelembagaan.....  | 36        |
| 5.2.3 Struktur Organisasi.....   | 39        |
| 5.2.4 Jumlah Pegawai .....   | 41        |
| 5.2.5 Pembinaan/ Pengembangan Pegawai.....   | 41        |
| 5.2.6 Mekanisme Kerja Dalam Kegiatan Bongkar Muat Ikan .....   | 43        |
| 5.3 Peran Dan Fungsi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan Dalam Pengembangan Kegiatan perikanan nelayan ..... | 47        |
| 5.3.1 Sarana Dan Prasarana Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan .....   | 47        |
| 5.3.2 Peran Dan Fungsi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan .....   | 61        |
| 5.4 Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan Dalam Peningkatan Peran Dan Fungsi Pelabuhan .....      | 65        |
| 5.4.1 Faktor Pendukung Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan .....   | 66        |
| 5.4.2 Faktor Penghambat Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan.....   | 66        |
| <b>6. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>   | <b>70</b> |
| 6.1 Kesimpulan .....   | 70        |
| 6.2 Saran .....  | 72        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>   | <b>74</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>   | <b>76</b> |

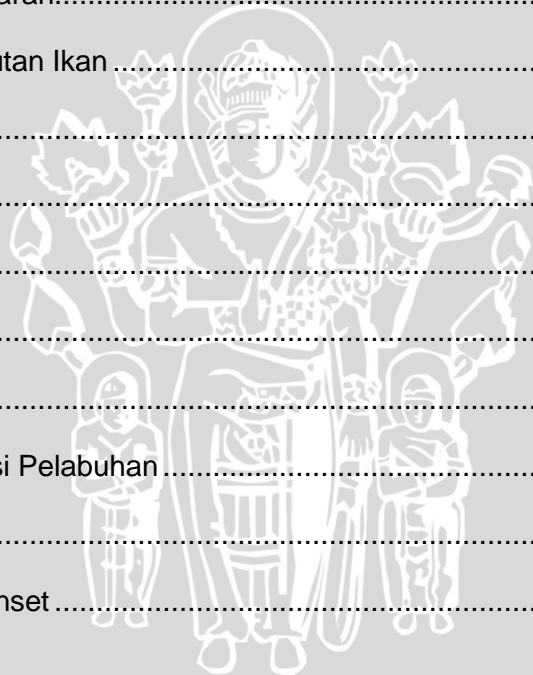
DAFTAR TABEL

| Tabel   | Halaman |
|---|---------|
| 1. Jenis dan Informan Yang Diambil Dalam Penelitian.....  | 23      |
| 2. Jumlah Penduduk Kecamatan Mayangan Berdasarkan Jenis Kelamin,<br>Pendidikan, Mata Pencaharian..... | 28      |
| 3. Jenis Dan Jumlah Alat Tangkap .....  | 29      |
| 4. Produktivitas Perikanan .....  | 30      |
| 5. Jumlah Nelayan .....   | 31      |
| 6. Fasilitas Pokok Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan .....                                    | 47      |
| 7. Fasilitas Fungsional Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan.....                                | 53      |
| 8. Fasilitas Penunjang Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan .....                                | 58      |



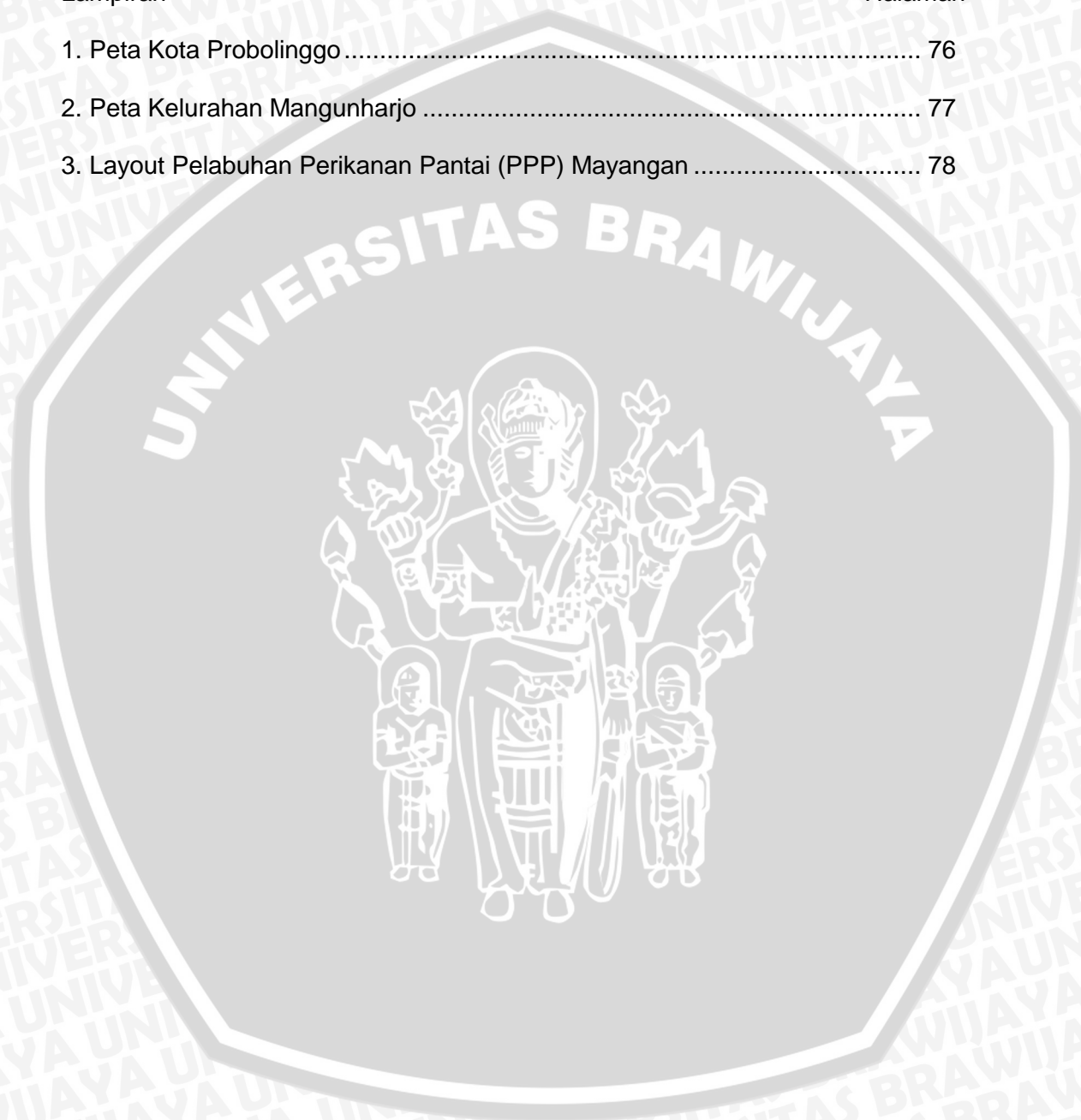
DAFTAR GAMBAR

| Gambar  | Halaman |
|---|---------|
| 1. Kerangka Berfikir .....  | 17      |
| 2. Struktur Organisasi PPP Mayangan.....                                  | 40      |
| 3. Skema/Alur Prosedur Pada Kapal Masuk Untuk Melakukan Bongkar Muat . 44 |         |
| 4. Struktur Organisasi Pada Nelayan Jonggrang .....                       | 45      |
| 5. Mekanisme Kerja Bongkar Muat Ikan.....                                 | 46      |
| 6. Proses Pembongkaran.....   | 46      |
| 7. Proses Pengangkutan Ikan .....   | 46      |
| 8. Breakwater.....  | 49      |
| 9. Dermaga .....  | 50      |
| 10. Jalan .....   | 51      |
| 11. Revetment .....   | 51      |
| 12. Kolam Pelabuhan.....  | 52      |
| 13. Kantor Administrasi Pelabuhan .....                                   | 54      |
| 14. Lampu Suar .....  | 55      |
| 15. Gedung Mesin Genset .....   | 55      |
| 16. SPBN.....   | 56      |
| 17. Tempat Parkir .....   | 56      |
| 18. Instansi Pengolahan Limbah (IPAL) .....                               | 57      |
| 19. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) .....                                    | 58      |



## DAFTAR LAMPIRAN

| Lampiran  | Halaman |
|---|---------|
| 1. Peta Kota Probolinggo .....                            | 76      |
| 2. Peta Kelurahan Mangunharjo .....                       | 77      |
| 3. Layout Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan ..... | 78      |



## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sebagai sebuah infrastruktur pembangunan ekonomi, pelabuhan memiliki peranan penting sebagai penggerak roda perekonomian suatu kawasan. Dalam konteks pembangunan kelautan, pelabuhan laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Dengan demikian, dalam konteks pembangunan kelautan, pelabuhan yang digolongkan baik harus memenuhi syarat 3C yaitu *comprehensive*, *coordinated*, dan *continuing* atau isu, sintesis dan gagasan ( Fauzi, 2005 dalam Astuti, 2009). Selanjutnya dikatakan pula bahwa fungsi pelabuhan laut yang komprehensif akan menunjang aktivitas ekonomi kelautan lainnya, yang pada gilirannya akan mengurangi biaya transaksi sehingga menyebabkan pelabuhan lebih efisien dan memberikan manfaat ekonomi yang tinggi. Pelabuhan laut yang terkoordinasi dengan baik juga akan memberikan fungsi pelayanan yang optimal sehingga meningkatkan permintaan terhadap jasa pelabuhan itu sendiri dimasa mendatang. Selain itu, karena pelabuhan memberikan jasa yang bersifat dinamis, maka kontinuitas pelayanan menjadi kunci utama pergerakan aktivitas ekonomi baik di kawasan pelabuhan itu sendiri maupun di wilayah sekitarnya. Fungsi ekonomi pelabuhan laut juga tidak terbatas pada wilayah pantai dan laut, tetapi juga pada skala regional secara menyeluruh baik pada tingkat *rural* maupun *urban*. Hal ini karena pelabuhan bukan saja melayani jasa transportasi, melainkan lebih dari itu menyediakan lapangan pekerjaan, pusat perdagangan, rekreasi, *dock servise*, dan sederet aktivitas turunan yang dihasilkan dari satu kegiatan ke kegiatan ekonomi lainnya.

Berdasarkan peraturan perikanan dan kelautan nomor per.16/MEN/2006 tentang pelabuhan perikanan bahwa sesuai dengan pasal 41 Undang-Undang

nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, Pelabuhan perikanan mempunyai peranan penting dalam mendukung peningkatan produksi perikanan, memperlancar arus lalu lintas kapal perikanan, mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat perikanan, pelaksanaan dan pengendalian sumber daya ikan dan mempercepat pelayanan terhadap kegiatan di bidang usaha perikanan.

Fungsi utama dari pelabuhan Perikanan adalah sebagai tempat berlindung, tempat berlabuh armada kapal ikan, tempat pemasaran, tempat pengembangan industri perikanan, tempat pengawasan sumber daya ikan dan pengawasan mutu hasil perikanan. Sebagai salah satu prasarana Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) akan berfungsi sebagai tempat pelayanan umum bagi masyarakat nelayan dan usaha perikanan yang secara khusus sebagai pusat pembinaan dan peningkatan ekonomi perikanan. Selain itu juga berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi daerah Jawa Timur dan khususnya Kota Probolinggo. Keberadaan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan yang modern diharapkan juga dapat sebagai penggerak perkembangan industri perikanan modern di Jawa Timur. Untuk Propinsi Jawa Timur meskipun pada saat ini sudah cukup banyak pelabuhan - pelabuhan perikanan, akan tetapi keperluan suatu pelabuhan perikanan yang modern sangat mendesak, mengingat potensi perikanan tangkap di Jawa Timur sangat tinggi.

Hubungan kerja kegiatan perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan akan sangat berpengaruh terhadap mekanisme kerja dari Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan itu sendiri. Dari adanya mekanisme dan hubungan kerja, maka tujuan dari Pelabuhan Perikanan Tangkap Mayangan tersebut dapat terwujud. Agar mekanisme dan hubungan

kerja dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan peran dan fungsi dari Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan dalam mengatur dan memfasilitasi kegiatan perikanan serta diharapkan dapat memperlancar kegiatan perikanan tersebut sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat nelayan di pesisir pantai Mayangan. Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini mengambil judul “Peran Dan Fungsi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan Kota Probolinggo Jawa Timur”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Pelabuhan Perikanan merupakan basis utama kegiatan industri perikanan yang dapat menjamin suksesnya aktivitas usaha perikanan tangkap di laut dan berfungsi sebagai terminal yang menghubungkan kegiatan usaha di laut dan darat ke dalam suatu sistem usaha dan berdaya guna tinggi. Penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan yang memadai akan mempengaruhi dari kegiatan produksi perikanan di wilayah laut dan darat. Kegiatan bongkar muat yang dilakukan oleh pekerja di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan sedikit banyak di pengaruhi oleh adanya manajemen tenaga kerja Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan. Agar kegiatan-kegiatan perikanan masyarakat nelayan tersebut dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan adanya peran serta dari Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan dalam mengatur dan memfasilitasi kegiatan perikanan serta diharapkan dapat memperlancar kegiatan perikanan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme kerja Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan?
2. Bagaimana peran dan fungsi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan dalam pengembangan kegiatan perikanan nelayan?
3. Bagaimana pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan dalam peningkatan peran dan fungsi pelabuhan?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Mekanisme kerja Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan
2. Peran dan fungsi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan dalam pengembangan kegiatan perikanan nelayan.
3. Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan dalam peningkatan peran dan fungsi pelabuhan.

### 1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:

1. Peneliti  
Sebagai penambah wawasan, pengetahuan dan sebagai bahan untuk penelitian lebih lanjut.
2. Peguruan tinggi dan kalangan akademis  
Sebagai bahan referensi sehingga bisa digunakan sebagai referensi dasar untuk penelitian lebih lanjut.
3. Instansi terkait



Sebagai bahan untuk pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan usaha disektor perikanan

4. Pemerintah

Sebagai bahan untuk pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.



## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pelabuhan Perikanan

#### 2.1.1 Pengertian Pelabuhan Perikanan

Menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.10 / MEN / 2004 tentang pelabuhan perikanan pada ketentuan umum pasal 1, Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan perikanan. Pelabuhan Perikanan Pantai adalah unit pelaksana teknis Departemen Kelautan dan Perikanan di bidang prasarana pelabuhan perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. Pelabuhan Perikanan Pantai dipimpin oleh seorang Kepala.

Sedangkan menurut Murdiyanto (2004), Pelabuhan Perikanan adalah tempat pelayanan umum bagi masyarakat nelayan dan usaha perikanan, sebagai pusat pembinaan dan peningkatan kegiatan ekonomi perikanan yang dilengkapi dengan fasilitas di darat dan di perairan sekitarnya untuk digunakan sebagai pangkalan operasional tempat berlabuh, bertambat, mendaratkan hasil, penanganan, pengolahan, distribusi dan pemasaran hasil perikanan.

#### 2.1.2 Klasifikasi Pelabuhan Perikanan

Menurut Martinus, 2006 berdasarkan klasifikasi besar-kecil skala usahanya pelabuhan perikanan dibedakan menjadi empat tipe pelabuhan yaitu:

- a. Pelabuhan Perikanan tipe A (Pelabuhan Perikanan Samudera)

- Memiliki jangkauan operasional di perairan samudera yang lazim digolongkan ke dalam armada perikanan jarak jauh sampai ke perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan perairan internasional.
  - Mempunyai perlengkapan untuk menangani (*handling*) dan mengolah sumber daya ikan sesuai dengan kapasitasnya yaitu jumlah hasil ikan yang didaratkan.
  - Panjang dermaga sekurang-kurangnya 300 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 3 m.
  - Jumlah ikan yang didaratkan minimum sebanyak 200 ton per hari atau 73.000 ton per tahun (baik pemasaran di dalam maupun di luar negeri/ekspor).
  - Pelabuhan ini menampung kapal berukuran lebih besar 60 GT (gross tonnage), dengan jumlah sampai dengan 100 unit kapal sekaligus.
  - Mempunyai cadangan lahan untuk pengembangan seluas 30 Ha.
- b. Pelabuhan Perikanan tipe B (Pelabuhan Perikanan Nusantara)
- Memiliki jangkauan operasional di perairan samudera yang lazim digolongkan ke dalam armada perikanan jarak sedang sampai ke perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
  - Mempunyai perlengkapan untuk menangani (*handling*) dan mengolah sumber daya ikan sesuai dengan kapasitasnya yaitu jumlah hasil ikan yang didaratkan.
  - Panjang dermaga sekurang-kurangnya 150 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 3 m.
  - Jumlah ikan yang didaratkan minimum sebanyak 55 ton per hari atau 18.250 ton per tahun untuk pemasaran di dalam negeri.

- Pelabuhan ini menampung kapal berukuran 15 - 60 GT (gross tonnage), dengan jumlah sampai dengan 50 unit kapal sekaligus.
  - Mempunyai cadangan lahan untuk pengembangan seluas 10 Ha.
- c. Pelabuhan Perikanan tipe C (Pelabuhan Perikanan Pantai)
- Memiliki jangkauan operasional di perairan pantai.
  - Mempunyai perlengkapan untuk menangani (*handling*) dan mengolah sumber daya ikan sesuai dengan kapasitasnya yaitu jumlah hasil ikan yang didaratkan.
  - Panjang dermaga sekurang-kurangnya 100 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 2 m.
  - Jumlah ikan yang didaratkan minimum sebanyak 20 ton per hari atau 7.300 ton per tahun untuk pemasaran di daerah sekitarnya atau untuk dikumpulkan dan dikirim ke pelabuhan perikanan yang lebih besar.
  - Pelabuhan ini menampung kapal berukuran 15 GT (gross tonnage), dengan jumlah sampai dengan 25 unit kapal sekaligus.
  - Mempunyai cadangan lahan untuk pengembangan seluas 5 Ha.
- d. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)
- Dibangun untuk melengkapi ke tiga tipe pelabuhan perikanan tersebut di atas yaitu suatu pangkalan untuk pendaratan ikan hasil tangkapan nelayan berskala lebih kecil daripada pelabuhan perikanan pantai di tinjau dari kapasitas penanganan jumlah produksi ikan, maupun fasilitas dasar dan perlengkapannya.
  - Menampung pendaratan ikan yang dapat menangani produksi ikan sampai dengan 5 ton per hari.

- Menampung kapal perikanan sampai dengan ukuran 5 GT (gross tonnage) sebanyak 15 unit sekaligus.
- Panjang dermaga sekurang-kurangnya 50 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 2 m.
- Mempunyai cadangan lahan untuk pengembangan seluas 1 Ha.

### 2.1.3 Fungsi Pelabuhan Perikanan

Pada hakekatnya pelabuhan perikanan merupakan basis utama kegiatan industry perikanan tangkap yang harus dapat menjamin suksesnya aktivitas usaha perikanan tangkap di laut. Pelabuhan perikanan berperan sangat besar dalam upaya peningkatan ekonomi serta peningkatan sumberdaya manusia (SDM) nelayan (Martinus, 2006).

Pelabuhan perikanan merupakan bagian dari sistem perikanan tangkap secara keseluruhan dimana pelabuhan perikanan merupakan *interface* antara aktifitas perikanan di laut (penangkapan) dengan aktifitas perikanan di darat (pengolahan dan pemasaran). Kemajuan perikanan tangkap dapat dilihat dari sejauhmana pelabuhan pelabuhan perikanan berkembang. Lebih dari itu, pelabuhan perikanan merupakan pusat segala aktifitas yang berhubungan dengan usaha penangkapan ikan dan usaha-usaha pendukung lainnya seperti usaha penyediaan bahan perbekalan, perkapalan, perbengkelan, pengolahan hasil tangkapan dan lain-lain (iinsolihin.wordpress.com, 2011).

Pelabuhan perikanan mempunyai fungsi yang bersifat umum (*general function*) dan fungsi khusus (*special function*). Fungsi umum merupakan fungsi yang terdapat pada semua pelabuhan sedangkan yang dimaksud fungsi khusus adalah fungsi-fungsi yang berkaitan dengan masalah perikanan yang memerlukan pelayanan khusus yang belum terlayani oleh adanya berbagai

fasilitas fungsi umum. Beberapa fungsi umum pelabuhan merupakan tugas pokok melindungi kapal dan pelayanan lainnya yang harus dapat dilakukan disetiap pelabuhan perikanan seperti pelabuhan perikanan seperti juga di pelabuhan yang bukan untuk kegiatan perikanan. Fungsi khusus merupakan tugas pelayanan di pelabuhan perikanan yang membedakan pelabuhan perikanan dengan pelabuhan selain pelabuhan perikanan. Fungsi khusus ini terutama diturunkan dari karakteristik komoditas perikanan yang mudah busuk (*highly perishable*). Sifat mudah busuk ini menghendaki pelayanan khusus berupa penanganan, pendistribusian hasil ikan secara cepat ataupun pengolahan yang tepat. Untuk komoditas hasil perikanan ini perlu tindakan bongkar muat ikan dilakukan berkali-kali dalam sehari (Murdiyanto B, 2004).

Adapun dilihat dari sisi fungsi dan perannya, pelabuhan perikanan memiliki dua fungsi yaitu : (Lubis, 2000 *dalam* Thamrin, 2005).

#### 1. Fungsi umum

- Jalan keluar masuk pendaratan ikan
- Menyediakan kolam air yang terlindungi dari gelombang
- Sebagai dermaga tempat sandar kapal
- Menyediakan pelayanan navigasi, penahan gelombang, perkantoran, halaman parker, dan fasilitas lainnya.

#### 2. Fungsi khusus

- Fasilitas pelelangan ikan
- Fasilitas pengolahan dan *grading* hasil tangkapan
- Fasilitas tangkapan
- Fasilitas pabrik es
- Fasilitas penyediaan dan perawatan sarana produksi perikanan

Peranan pelabuhan perikanan berperan sebagai terminal yang menghubungkan kegiatan usaha di laut dan di darat ke dalam suatu sistem usaha dan berdaya guna tinggi (Murdiyanto, 2004). Sedangkan menurut pendapat Lubis (2000) peranan pelabuhan perikanan meliputi beberapa aktivitas, antara lain:

- pusat aktivitas produksi
- pusat aktivitas distribusi
- pusat kegiatan masyarakat nelayan

## 2.2 Pengertian Manajemen Dan Fungsi Manajemen

Menurut James A.F. Stoner dalam Firdaus.M (2009) Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengordinasian, dan pengawasan anggota organisasi dalam proses penggunaan semua sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Secara umum, manajemen merupakan cara mengatur satu atau beberapa faktor untuk mencapai yang diharapkan. Demikian juga dalam usaha perikanan manajemen diperlukan agar bisnis berjalan lancar dan mendapat hasil seperti yang diharapkan.

Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya dari anggota organisasi serta penggunaan semua sumber daya yang ada pada organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya ([www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com), 2011).

Menurut Stephen (2004), manajemen sebagai proses mengkoordinasi kegiatan-kegiatan pekerjaan secara efisien dengan dan melalui orang lain, proses menggambarkan fungsi-fungsi yang sedang berjalan atau kegiatan utama yang

dilakukan oleh para manajer. Fungsi-fungsi itu lazimnya disebut merancang, mengorganisasi, memimpin dan mengendalikan. Peran manajemen mengacu kepada kategori-kategori tertentu menajerial yang berkaitan dengan hubungan antar pribadi berkaitan dengan informasi berkaitan dengan pengambilan keputusan.

## **2.3 Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Sumber Daya Manusia**

### **2.3.1 Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia (SDM) merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Bicara mengenai sumber daya manusia, maka terkait juga dengan perencanaan SDM, yaitu proses analisis dan identifikasi tersedianya kebutuhan akan SDM sehingga organisasi dapat mencapai tujuannya. Ada tiga kepentingan dalam perencanaan sumber daya manusia, yaitu: kepentingan individu, kepentingan organisasi, kepentingan nasional (www.anneahira.com, 2011).

Dengan semakin berkembangnya keadaan yang terjadi di dalam masyarakat, manusia senantiasa mempunyai kedudukan yang makin penting. Meskipun kita berada atau sedang menuju masyarakat yang berorientasi kerja, yang memandang kerja adalah sesuatu yang mulia, kita tidaklah berarti mengabaikan manusia yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Sumber daya manusia perlu penanganan manajemen untuk mengoptimalkan tujuan, asal saja



nilai dan harkat manusia merupakan pijakan dan pertimbangan dari manajemen (Sondang, 1993).

### **2.3.2 Manajemen Sumber Daya Manusia**

Menurut Dessler (1997), manajemen sumber daya manusia adalah suatu kebijakan dan praktik yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan aspek “orang” atau sumber daya manusia dari posisi seorang manajemen, meliputi perekrutan, pelatihan, pengimbangan dan penilaian.

Manajemen sumber daya manusia adalah suatu cara mengatur sumber daya yang dimiliki oleh individu dapat digunakan secara maksimal sehingga tujuan dapat tercapai. Manajemen sumber daya manusia juga menyangkut desain dan implementasi sistem perencanaan, penyusunan karyawan, pengembangan karyawan, pengelolaan karier, evaluasi kinerja, kompensasi karyawan dan hubungan ketenagakerjaan yang baik. Manajemen sumber daya manusia melibatkan semua keputusan dan praktek manajemen yang mempengaruhi secara langsung sumber daya manusianya. Manajemen sumber daya manusia diperlukan untuk meningkatkan efektivitas sumber daya manusia dalam organisasi. Tujuannya adalah memberikan kepada organisasi satuan kerja yang efektif (www.anneahira.com, 2011).

### **2.4 Tenaga Kerja**

Tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan alat produksi utamanya dalam proses produksi adalah tenaganya sendiri, baik tenaga fisik maupun pikiran. Ciri khas dari hubungan kerja ialah bekerja di bawah perintah orang lain

dengan menerima upah. Secara singkat dapat dikatakan tenaga kerja adalah bagian dari penduduk yaitu penduduk dalam usia kerja. Tenaga kerja (*manpower*) terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari golongan yang bekerja dan golongan yang menganggur atau yang sedang mencari pekerjaan. Kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari golongan yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga dan golongan lain-lain atau penerima pendapatan (Manullang, 1990).

Tenaga kerja dalam perusahaan merupakan sumber daya manusia yang berpengaruh besar dalam pencapaian suatu tujuan perusahaan tersebut. Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor sentral dalam suatu organisasi. Oleh karena itu, manajemen sumber daya manusia juga bagian dari ilmu manajemen yang mengacu kepada fungsi manajemen dalam pelaksanaan proses perencanaan, pengorganisasian, *staffing*, memimpin dan mengendalikan (Sumarsono, 2003).

## 2.5 Mekanisme dan Hubungan Kerja

Mekanisme adalah suatu cara kerja dari sebuah perusahaan yang tersusun secara sistematis agar tujuan kerja dari suatu perusahaan dapat tercapai (www.focustraco.com, 2011).

Hubungan kerja adalah sebagai hubungan yang terjadi antara bagian-bagian atau individu-individu baik antara mereka di dalam organisasi maupun antara mereka dengan pihak luar organisasi sebagai akibat penyelenggaraan tugas dan fungsi masing-masing dalam mencapai sasaran dan tujuan organisasi (www.anneahira.com, 2011).

Dalam hubungan kerja harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban untuk pengusaha dan pekerja, artinya pengusaha tidak hanya mementingkan mencari keuntungan semata sehingga memperlakukan pekerja sebagai alat produksi. Dan sebaliknya pekerja pun tidak hanya menuntut hak-haknya saja tanpa harus melaksanakan kewajibannya dengan baik. Hak dan kewajiban harus diatur secara jelas melalui peraturan perundangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan/atau perjanjian kerja bersama agar ada kepastian bagi kedua belah pihak untuk tercapainya hubungan kerja yang serasi dan harmonis antara pengusaha dan pekerja. Dengan demikian perusahaan diharapkan dapat tumbuh dan berkembang demi kepentingan pemilik modal dan kesejahteraan pekerja serta keluarganya. Dengan kelangsungan usaha dan ketenangan kerja maka perselisihan dapat ditekan seminimal mungkin dan kalau pun ada perbedaan pendapat akan dapat diselesaikan sendiri oleh para pihak secara damai (www.focustraco.com, 2011).

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah hubungan kerja yang terjadi di dalam pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan sendiri dan pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan dengan instansi terkait lainnya (DKP, UPPPP, perusahaan swasta, dll).

## **2.6 Perikanan Tangkap**

Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, telah didefinisikan bahwa Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang

dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan (Pasal 1 ayat 1). Sedangkan yang dimaksud dengan Penangkapan Ikan adalah Kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya (Pasal 1 ayat 5). Berdasarkan definisi tersebut, perikanan tangkap merupakan suatu sistem yang terdiri atas beberapa elemen atau subsistem yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu dengan lainnya. Perikanan tangkap komersial sebagai suatu sistem yaitu sarana produksi, usaha penangkapan, prasarana (pelabuhan), unit pengolahan, unit pemasaran, dan unit pembinaan. Keseluruhan sistem tersebut perlu dikelola secara terpadu (www.kppu.go.id, 2011).

Perikanan tangkap adalah usaha ekonomi dengan mendayagunakan sumber hayati perairan dan alat tangkap untuk menghasilkan dan memenuhi permintaan akan ikan (Achmad 1999). Pengusahaan perikanan yang tidak terawasi dapat mengakibatkan penangkapan yang berlebih (overfishing), penurunan mutu bahkan dapat merusak produktivitasnya (Naamin 1991).

Kegiatan usaha perikanan yang terdapat di Kota Probolinggo meliputi usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Usaha Perikanan Tangkap atau penangkapan ikan di perairan umum berlokasi di Kecamatan Mayangan dengan komoditas unggulan di perairan Mayangan yaitu kakap merah, kurisi, kerapu, dan lemuru. Jumlah produksi penangkapan ikan yang dihasilkan dalam tahun 2006 tercatat sebesar 52.218,70 Ton atau rata-rata setiap hari didaratkan sebesar 143 Ton. Adapun alat tangkap yang dipergunakan meliputi : Bubu 95 unit, Pancing Pawai 125 unit, Gillnet 95 unit, Jaring Payang 85 unit, Trammel net

58 unit, Sero 110 unit, pukot pantai 88 unit, alat pengumpul kerang 35 unit, jaring Purse Seine 20 unit dan alat lainnya 190 unit (www.probolinggokota.go.id, 2011).

## 2.7 Kerangka Penelitian

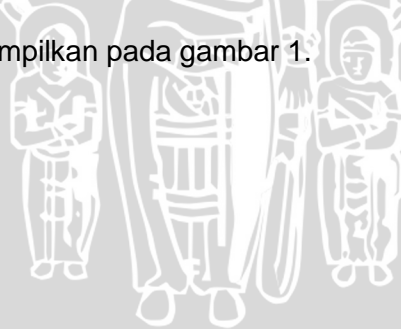
Keberhasilan pengembangan sektor perikanan tidak terlepas dari dukungan prasarana pendukungnya dimana dalam hal ini adalah pelabuhan perikanan. Berbicara masalah perikanan tangkap tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai pelabuhan perikanan karena memang pelabuhan perikanan merupakan bagian dari sistem perikanan tangkap secara keseluruhan dimana pelabuhan perikanan merupakan penghubung antara aktifitas perikanan di laut (penangkapan) dengan aktifitas perikanan di darat (pengolahan dan pemasaran). Kemajuan perikanan tangkap dapat dilihat dari sejauhmana pelabuhan perikanan berkembang. Lebih dari itu, pelabuhan perikanan merupakan pusat segala aktifitas yang berhubungan dengan usaha penangkapan ikan dan usaha-usaha pendukung lainnya seperti usaha penyediaan bahan perbekalan, perkapalan, perbengkelan, pengolahan hasil tangkapan dan lain-lain.

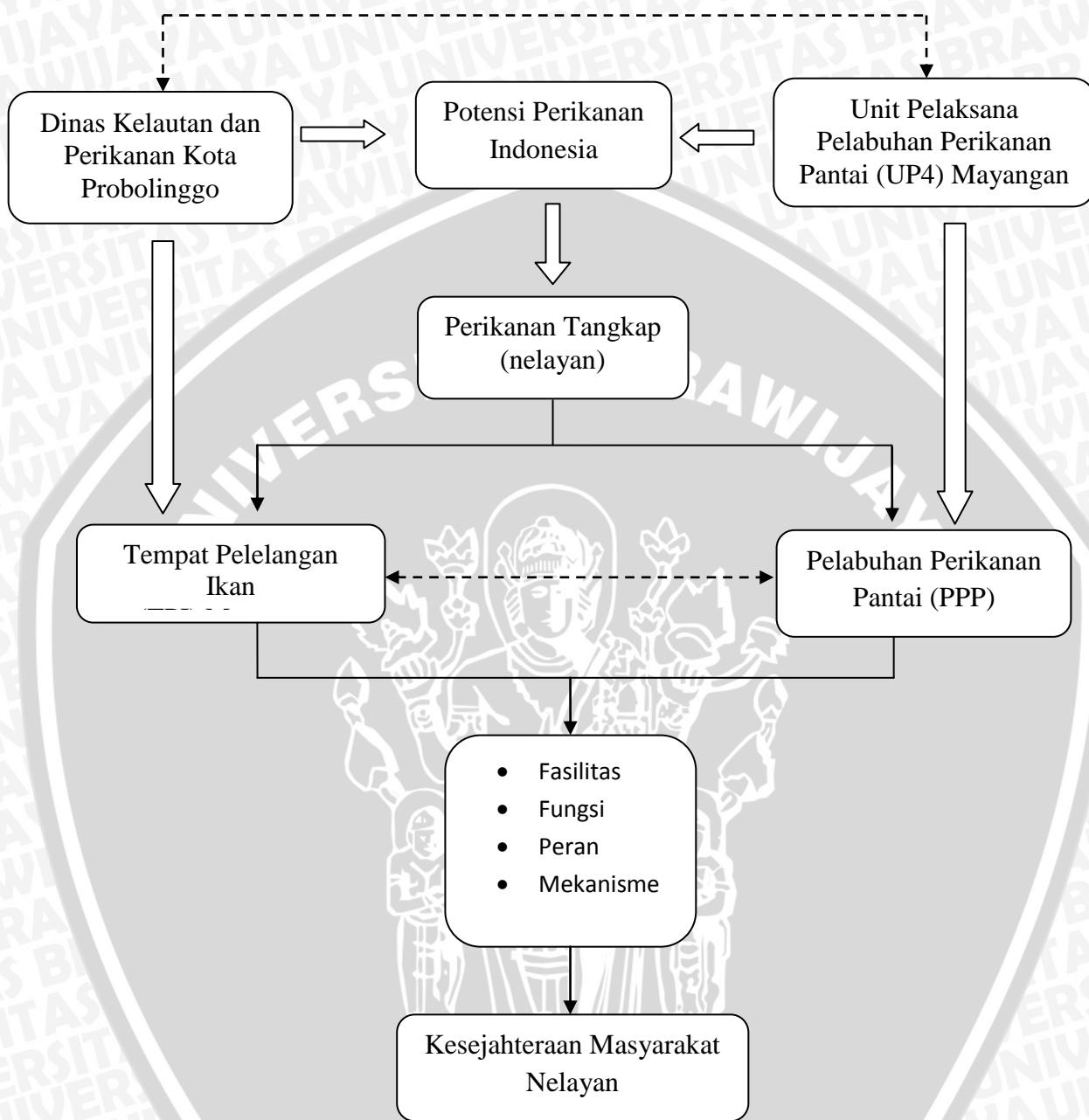
Dalam kegiatan pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan memerlukan adanya prasarana pelabuhan perikanan sebagai tempat berlabuh kapal perikanan, tempat pendaratan ikan, tempat pemasaran dan distribusi ikan, tempat pengumpulan data tangkap, tempat pelaksanaan penyuluhan serta pengembangan masyarakat nelayan dan tempat untuk memperlancar kegiatan operasional kapal perikanan. Dari fungsi pelabuhan tersebut akan menimbulkan berbagai aktivitas ekonomi yang berhubungan dengan kegiatan diantaranya

kegiatan penangkapan dan bongkar muat ikan dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Untuk mendukung kegiatan tersebut diperlukan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan yang memadai, dalam hal ini peran pemerintah sangat diperlukan. Pemerintah berperan sebagai fasilitator (penyedia fasilitas operasional), regulator (pembuat kebijakan) dan evaluator (mengadakan evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan). Mekanisme kerja di Pelabuhan Perikanan Pantai akan sangat berpengaruh terhadap setiap kegiatan usaha yang ada pada pelabuhan tersebut, sehingga mekanisme yang jelas dari suatu kegiatan sangat diperlukan agar dapat berjalan dengan baik.

Jika mekanisme kerja pada suatu pelabuhan perikanan pantai dapat berjalan dengan baik maka nelayan sebagai pengguna dapat memanfaatkan fasilitas pelabuhan yang telah di sediakan dalam menunjang kegiatan perikanan tangkap secara maksimal. Untuk lebih jelas, dapat dilihat pada alur kerangka pemikiran seperti yang ditampilkan pada gambar 1.





Gambar 1. Kerangka

Keterangan :

- - - - - : Garis Koordinasi
- : Garis Wewenang
- : Garis Proses

### 3. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Lokasi, Waktu Dan Obyek Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan pada bulan Pebruari – Maret 2011 yang berlokasi di Pelabuhan Perikanan Pantai Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Lokasi penelitian dapat dilihat pada lampiran 1. Pada penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan dan nelayan (juragan darat nelayan jonggrang) di Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan.

#### 3.2 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif, sedangkan teknik deskriptif yang digunakan dalam penelitian adalah studi kasus. Penelitian deskriptif merupakan pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu, yang meliputi pengembangan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa (Singarimbun dan Effendi, 1989).

Menurut Mardalis (2008), penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa, menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang terjadi. Penelitian deskriptif bertujuan memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada. Penelitian ini tidak menguji hipotesa atau tidak menggunakan hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti.

Teknik deskriptif studi kasus adalah penelitian mendalam mengenai unit sosial tertentu yang hasilnya merupakan gambaran yang lengkap dan



terorganisasi baik mengenai unit tersebut. Menurut Amirin T (1995), menyatakan yang dimaksud dengan studi kasus itu merupakan penelitian yang mendalam mengenai suatu kasus. Sudah tentu hasilnya hanya berlaku bagi kasus itu sendiri, tidak bisa digeneralisasikan pada yang di luar kasus tersebut. Kecuali jika kasus-kasus serupa banyak dijumpai, sehingga bisa menyimpulkan secara umum berdasarkan karakteristik tertentu yang memang sama. Studi kasus bisa mengambil kesimpulan tertentu berdasarkan data mengenai “faktor penyebab” terjadinya kasus tersebut, dan amat berbeda dengan penelitian survey yang melibatkan banyak sekali sampel, studi kasus hanya pada satu orang atau unit tertentu saja. Studi kasus pada penelitian ini adalah peran dan fungsi pada Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan Kota Probolinggo Jawa Timur.

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data berdasarkan sifatnya, dapat digolongkan menjadi dua yaitu :

#### a. Data Primer

Menurut Umar (2001) dalam Sudjarwo dan Basrowi (2009), yang dimaksud data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama, baik dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner. Terdapat beberapa metode dalam pengumpulan data primer antara lain yaitu, observasi dan wawancara.

Data primer pada penelitian ini meliputi:

- struktur organisasi pada nelayan pada waktu bongkar muat.
- mekanisme kerja pada waktu bongkar muat.
- peran dan fungsi pelabuhan perikanan pantai.
- faktor pendukung dan penghambat pelabuhan perikanan pantai.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari:

- Wawancara kepada pegawai Pelabuhan Perikanan Pantai.
- Wawancara Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Probolinggo.
- Wawancara nelayan seperti pemilik kapal atau juragan darat.

Sebagai sumber data primer pada penelitian ini berasal dari nelayan (juragan darat nelayan jonggrang), pegawai pelabuhan perikanan pantai (Kepala UP4, Kepala Sub Bag Tata Usaha, staf UP4), pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Probolinggo (Kepala bagian PSDK, staf Dinas Kelautan dan Perikanan).

#### b. Data Sekunder

Menurut Marzuki (2005), data sekunder adalah data yang cara pengumpulannya bukan diusahakan sendiri oleh pihak peneliti tetapi diperoleh dari pihak lain, misalnya diambil dari biro statistik, dokumen perusahaan, surat kabar dan publikasi lainnya.

Data sekunder pada penelitian ini meliputi:

- jumlah penduduk Kecamatan Mayangan
- tata letak pelabuhan perikanan pantai
- struktur organisasi
- keadaan topografi daerah Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan.

Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari:

- laporan tahunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Probolinggo.
- Kecamatan Mayangan dan Kantor Kelurahan.

Sebagai sumber data sekunder pada penelitian ini berasal dari laporan tahunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan, data statistik dari Dinas

Kelautan dan Perikanan Kota Probolinggo, data profil Kecamatan Mayangan, dan literatur yang diperoleh dari buku dan internet.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standard untuk memperoleh data yang diperlukan. Adapun teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber dilakukan dengan cara:

#### a. Observasi

Menurut Marzuki (2005), Observasi berarti melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diselidiki, tanpa mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Menurut Ngalim Purwanto (1985) dalam Sudjarwo dan Basrowi (2009), Observasi adalah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.

Pada penelitian ini yang diobservasi adalah mekanisme kerja Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan, peran dan fungsi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan dalam pengembangan kegiatan perikanan nelayan, faktor pendukung dan penghambat yang dialami oleh Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan.

#### b. Wawancara

Metode lain yang juga digunakan dalam pengumpulan data adalah metode wawancara, menurut Marzuki (2005) metode wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan tujuan penelitian. Dalam *interview*

(wawancara) selalu ada dua pihak yang masing-masing mempunyai kedudukan yang berlainan.

Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan untuk memperoleh data primer menggunakan teknik wawancara bebas. Wawancara ini meliputi tentang landasan hukum pada pelabuhan perikanan pantai, hubungan kelembagaan, peran dan fungsi pelabuhan perikanan pantai, faktor pendukung dan penghambat dari pelabuhan perikanan pantai, dan mekanisme kerja dalam kegiatan bongkar muat ikan. Wawancara ini dilakukan kepada pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Probolinggo, nelayan (juragan darat nelayan jonggrang).

### **3.5 Populasi Dan Sampel**

#### **3.5.1 Populasi**

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti. Objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi disebut unit analisis atau elemen populasi. Unit analisis dapat berupa orang, perusahaan, media dan sebagainya (Iqbal, 2002).

Dalam penelitian ini populasi yang dimaksud adalah nelayan, dan pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan. Yang dimaksud dengan nelayan pada penelitian ini adalah juragan darat, karena yang paling mengetahui mekanisme kegiatan perikanan tangkap pada nelayan adalah juragan darat selaku pemilik kapal.

#### **3.5.2 Sampel**

Sampel adalah bagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi (jumlah sampel lebih

sedikit dari populasi). Karena kesimpulan dari sampel merupakan penggambaran dari populasi maka harus ada syarat-syarat tertentu di dalam pemilihan sampel. Syarat utamanya adalah sampel harus menjadi cermin dari populasi, sampel harus merupakan dalam bentuk kecil. Kalau syarat tersebut tidak terpenuhi maka kesimpulan mengenai populasi tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, kesimpulan akan menimpang atau *biased conclusion* (Djarwanto dan Subagyo, 1993).

Menurut Mardalis (2008), metode purposive sampling mempunyai suatu tujuan atau dilakukan dengan sengaja, cara penggunaan sampel ini diantara populasi sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya. Selain itu, penggunaan teknik ini senantiasa berdasarkan kepada pengetahuan tentang ciri-ciri tertentu yang telah didapat dari populasi sebelumnya.

Dalam penelitian ini sampel yang diambil yaitu pemilik kapal atau juragan darat nelayan jonggrang; pegawai Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan.. Sampel juragan darat nelayan jonggrang yang diambil dengan mempertimbangkan beberapa alasan yaitu: nelayan jonggrang paling sering melakukan aktivitas kegiatan perikanan tangkap di lingkungan pelabuhan perikanan pantai, jumlah dari nelayan jonggrang lebih banyak dari pada nelayan yang lain, selain itu juragan darat memiliki informasi yang lebih dibandingkan ABK.

Tabel 1. Jenis dan Informan Yang Diambil Dalam Penelitian

| NO | Informan   | Jumlah (orang) |
|----|--|----------------|
| 1  | Instansi pemerintah <ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Kelautan dan Perikanan Probolinggo (Kepala bagian PSDK, staf Dinas Kelautan dan Perikanan )</li><li>• Unit Pelaksana Pelabuhan Perikanan Pantai (UP4) Mayangan (Kepala UP4, Kepala Sub Bag Tata Usaha, staf UP4)</li></ul> | 4<br><br>6     |
| 2  | Nelayan (juragan darat nelayan jonggrang)  | 10             |

### 3.6 Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisa data yang dilakukan adalah deskriptif (penjelasan secara terperinci). Tujuan utama dari penelitian deskriptif adalah melukiskan realitas sosial yang kompleks sedemikian rupa sehingga relevansi sosiologis tercapai (Vreendenbergt), 1985).

Adapun tahapan dalam menganalisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Pengumpulan data, yang terdiri dari:

- Mengedit data, yaitu memeriksa data yang terkumpul.
- Klasifikasi data, yaitu mengadakan seleksi data yang terkumpul sesuai dengan sumber data masing-masing.

- b) Pengelolaan dan penyajian data dilakukan setelah data terkumpul diklasifikasikan dengan beberapa kebutuhan, kemudian dilakukan pengelolaan data dengan cara mengklasifikasikan dalam bentuk uraian.
- c) Pengembangan dan pengambilan alternatif yaitu setelah data diolah maka diambil beberapa alternative yang terbaik atau dijadikan bahan penyampaian informasi dan pengambilan keputusan.

Selanjutnya, proses analisis data baik ketika mengumpulkan data maupun setelah selesai pengumpulan dimulai dengan:

1. Reduksi Data

Proses pemilihan, pemberian fokus, penyederhanaan dan transformasi data mentah yang terdapat dilapangan. Hal ini bertujuan mempertajam, menggolongkan, menyortir dan mengorganisasikan data.

2. Penyajian Data

Proses penyusunan informasi yang kompleks kedalam bentuk yang sistematis dan member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan.

3. Menarik kesimpulan dan Verifikasi

Merupakan akhir dari kegiatan analisis berupa penarikan kesimpulan dengan cara meninjau ulang data-data yang diperoleh dilapangan agar data tersebut valid (Sanapiah Faisal, 1990).

## 4. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

### 4.1 Letak Geografis dan Topografis

Kota Probolinggo adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Terletak sekitar 100 km sebelah tenggara Kota Surabaya, yang berbatasan dengan Selat Madura di sebelah utara, serta Kabupaten Probolinggo di sebelah timur, selatan, dan tengah.

Kota ini juga terdapat pelabuhan perikanan yang cukup besar. Daerah yang menjadi lingkup perencanaan dalam pengembangan Kawasan Pesisir dan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan adalah sumberdaya alam dan laut Kota Probolinggo. Kawasan pengembangan kawasan pesisir dan pelabuhan terbagi oleh 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Mayangan dan Kecamatan Kademangan.

Kecamatan Mayangan terletak pada  $7^{\circ}43' - 8^{\circ}10'$  Lintang Selatan (LS) dan  $112^{\circ}51' - 112^{\circ}30'$  Bujur Timur (BT). Dengan suhu udara maksimal  $32^{\circ}$ , suhu minimal  $26^{\circ}$ , dan ketinggian 4 meter di atas permukaan laut. Adapun batas-batas wilayah ini adalah sebagai berikut :

- sebelah Utara : Selat Madura
- sebelah Timur : Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo
- sebelah Selatan : Kelurahan Sukabumi, Kel. Mangunharjo, Kel. Tisonengaran
- sebelah Barat : Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo

Wilayah Kecamatan Mayangan yang termasuk dalam kawasan pesisir dan laut terdiri dari Kelurahan Wiroborang, Kelurahan Jati, Kelurahan Sukabumi, Kelurahan Mangunharjo, dan Kelurahan Mayangan. Sedangkan wilayah Kecamatan Kademangan yang termasuk dalam kawasan pesisir dan laut meliputi Kelurahan Pilang dan Kelurahan Ketapang.



Penelitian ini dilakukan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan yang bertempat di Kelurahan Mangunharjo. Kelurahan Mangunharjo memiliki luas wilayah 345 Ha yang dipergunakan untuk lahan pemukiman penduduk, lahan pertanian, serta bangunan lainnya.. Kelurahan Mangunharjo ini berbatasan dengan beberapa daerah diantaranya :

sebelah Utara : Selat Madura  
sebelah Selatan : Kelurahan Jati, Kelurahan Kebonsari Kulon  
sebelah Barat : Kelurahan Sukabumi, Kelurahan Tisnonegaran  
sebelah Timur : Kelurahan Wiroborang

Ketinggian tempat Kelurahan Mangunharjo yaitu 4 meter dari permukaan laut. Jarak Kelurahan Mangunharjo ke pusat pemerintahan kecamatan terdekat adalah 0,5 km dengan lama tempuh ke pusat pemerintahan terdekat kurang lebih 5 menit. Sedangkan jarak tempuh ke kota dati II adalah 1 km dengan lama tempuh ke kota dati II kurang lebih 10 menit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 2.

#### **4.2 Penduduk**

Masyarakat Kecamatan Mayangan dikenal cukup dinamis dan suka bekerja keras. Komposisi penduduk asli didominasi dari suku Jawa, Madura, China dan sebagian kecil keturunan Arab. Bahasa yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah bahasa Jawa. Jumlah penduduk di Kecamatan Mayangan berdasarkan data pada tahun 2010 adalah sebesar 38.150 jiwa dengan rincian jumlah laki-laki sebesar 18.839 jiwa dan jumlah perempuan sebesar 19.311 jiwa. Dari data jumlah penduduk di Kecamatan Mayangan dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada jumlah

penduduk laki-laki. Hal tersebut diketahui dari persentase perempuan sebesar 49,4%, sedangkan laki-laki sebesar 50,61%. Untuk data jumlah penduduk Kecamatan Mayangan berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Kecamatan Mayangan Berdasarkan Jenis Kelamin, Pendidikan, dan Mata Pencaharian.

| NO | Uraian                           | Jumlah (Jiwa) | Persentase (%) |
|----|----------------------------------|---------------|----------------|
| 1  | Jenis Kelamin                    |               |                |
|    | - Laki-laki                      | 18.839        | 49,4%          |
|    | - Perempuan                      | 19.311        | 50,61%         |
|    | Jumlah Total                     | 38.150        | 100%           |
| 2  | Pendidikan                       |               |                |
|    | - Belum sekolah                  | 850           | 3,62%          |
|    | - SD                             | 7153          | 30,50%         |
|    | - SMP                            | 4804          | 20,49%         |
|    | - SMA                            | 7536          | 32,13%         |
|    | - Perguruan tinggi               | 2742          | 11,61%         |
|    | - Buta huruf                     | 360           | 1,53%          |
| 3  | Mata Pencaharian                 |               |                |
|    | - Karyawan perusahaan swasta     | 4959          | 15,1%          |
|    | - Pegawai Negeri Sipil/TNI-POLRI | 16404         | 50%            |
|    | - Petani                         | 6485          | 19,76%         |
|    | - Pedagang                       | 2670          | 8,13%          |
|    | - Nelayan                        | 2289          | 6,97%          |

Sumber : Data Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo Tahun 2010

Sedangkan jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan, SMA / sederajat paling banyak di Kecamatan Mayangan yaitu sebanyak 7536 jiwa dengan persentase sebesar 32,13%. Kebanyakan masyarakat di Kecamatan

Mayangan adalah bekerja setelah menyelesaikan SMA, baik di sebagai buruh pabrik ataupun Pegawai Negeri Sipil ataupun TNI/POLRI. Dari data jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian, Pegawai Negeri Sipil / TNI-POLRI yang paling banyak menyerap tenaga kerja yaitu sebesar 16404 jiwa dengan persentase 50%.

#### 4.3 Kegiatan Perikanan Tangkap

##### 4.3.1 Jenis dan Jumlah Alat Tangkap

Jenis dan jumlah alat tangkap berdasarkan Sumber Data Statistik Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Probolinggo sebagai berikut :

Tabel 3. Jenis Alat Tangkap di Kota Probolinggo

| NO | Jenis Alat Tangkap   | Jumlah (Unit) |
|----|----------------------|---------------|
| 1  | Cantrang / Jonggrang | 98            |
| 2  | Purse Seine          | 14            |
| 3  | Rawai Dasar          | 3             |
| 4  | Gill Net             | 2             |
| 5  | Bubu                 | 3             |

Sumber : Data Statistik DKP Kota Probolinggo tahun 2010

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan perikanan tangkap di kota Probolinggo paling banyak menggunakan alat tangkap cantrang/jonggrang, yaitu sebanyak 98 unit. Sedangkan yang kedua adalah purse seine, yaitu sebanyak 14 unit.

### 4.3.2 Produktivitas Perikanan

Tabel 4.Data Produktivitas Perikanan di Kota Probolinggo

| NO | Jenis Ikan    | Produksi (Ton) | Nilai Produksi (Rp)   |
|----|---------------|----------------|-----------------------|
| 1  | Sebelah       | 371,3          | Rp.3.382.850.000,00   |
| 2  | Lidah         | 306,3          | Rp.1.501.250.000,00   |
| 3  | Peperek       | 957,8          | Rp.1.341.035.000,00   |
| 4  | Manyung       | 87,0           | Rp.768.182.000,00     |
| 5  | Beloso        | 140,4          | Rp.1.153.300.000,00   |
| 6  | Bijinangka    | 47,5           | Rp.331.900.000,00     |
| 7  | Gerot-Gerot   | 340,9          | Rp. 2.848.600.000,00  |
| 8  | Bambangan     | 5.247,6        | Rp.131.238.164.500,00 |
| 9  | Kerapu        | 1.885,2        | Rp.48.188.451.000,00  |
| 10 | Lencam        | 1.174,0        | Rp.11.901.241.000,00  |
| 11 | Kakap         | 1.984,0        | Rp.44.674.832.500,00  |
| 12 | Kursi         | 4.738,7        | Rp.78.784.979.500,00  |
| 13 | Swanggi       | 765,7          | Rp.6.007.702.000,00   |
| 14 | Ekor kuning   | 274,9          | Rp.2.137.550.000,00   |
| 15 | Gulamah       | 273,7          | Rp.2.124.303.500,00   |
| 16 | Cucut         | 65,0           | Rp.479.090.000,00     |
| 17 | Pari          | 76,5           | Rp.582.230.000,00     |
| 18 | Bawal Hitam   | 463,1          | Rp.9.866.479.000,00   |
| 19 | Bawal putih   | 411,0          | Rp.9.205.449.000,00   |
| 20 | Alu-alu       | 119,9          | Rp.1.152.500.000,00   |
| 21 | Layang        | 644,7          | Rp.5.155.990.000,00   |
| 21 | Selar         | 216,1          | Rp.1.785.120.000,00   |
| 22 | Kuwe          | 578,7          | Rp.6.456.920.000,00   |
| 23 | Tetengkek     | 2,3            |                       |
| 24 | Daun bamboo   | 31,9           | Rp.218.205.000,00     |
| 25 | Terbang       | 18,1           | Rp.598.205.000,00     |
| 26 | Belanak       | 157,7          | Rp.1.031.350.000,00   |
| 27 | Kuro/Senangin | 7,1            | Rp.49.700.000,00      |
| 28 | Julung-julung | 73,6           | Rp.515.200.000,00     |
| 29 | Teri          | 52,6           | Rp.761.550.000,00     |
| 30 | Japuh         | 4.636,4        | Rp.5.707.470.000,00   |
| 31 | Tembang       | 3.873,7        | Rp.8.144.340.000,00   |
| 32 | Lemuru        | 5.245,9        | Rp.6.600.610.000,00   |
| 33 | Golok-golok   | 45,8           | Rp.325.700.000,00     |
| 34 | Terubuk       | 16,6           | Rp.79.950.000,00      |
| 35 | Kembung       | 2.596,9        | Rp.3.301.820.000,00   |
| 36 | Tengiri papan | 973,5          | Rp.18.674.850.000,00  |
| 37 | Tengiri       | 1.130,5        | Rp.24.553.250.000,00  |
| 38 | Layur         | 53,6           | Rp. 466.000.000,00    |
| 39 | Cakalang      | 210,4          | Rp.2.562.050.000,00   |
| 40 | Tongkol       | 219,2          | Rp.2.632.250.000,00   |
| 41 | Layaran       | 147,4          |                       |
| 42 | Suro          | 28,9           | Rp.260.100.000,00     |

|    |               |          |                        |
|----|---------------|----------|------------------------|
| 43 | Kerong-kerong | 117,9    | Rp.1.061.100.000,00    |
| 44 | Sembilang     | 73,0     | Rp.678.100.000,00      |
| 45 | Cendro        | 31,9     | Rp.268.010.000,00      |
| 46 | Beronang      | 61,0     | Rp.509.925.000,00      |
| 47 | Kapas-kapas   | 99,2     | Rp.921.331.000,00      |
| 48 | Kulit pasir   | 38,5     | Rp.277.700.000,00      |
| 49 | buntak        | 92,9     | Rp.712.200.000,00      |
| 50 | Rajungan      | 36,8     | Rp.1.992.800.000,00    |
| 51 | Kepiting      | 49,3     | Rp.1.323.000.000,00    |
| 52 | Udang barong  |          |                        |
| 53 | Udang windu   | 184,0    | Rp.11.530.800.000,00   |
| 54 | Udang putih   | 358,0    | Rp.13.887.400.000,00   |
| 55 | Udang dogol   | 14,6     | Rp.282.800.000,00      |
| 56 | Udang rebon   | 11,6     | Rp.237.800.000,00      |
| 57 | Udang lainnya | 6,5      | Rp.140.450.000,00      |
| 58 | Tiram         | 26,2     | Rp.219.050.000,00      |
| 59 | Simping       | 79,1     | Rp.655.200.000,00      |
| 60 | Remis         | 61,9     | Rp.514.450.000,00      |
| 61 | Kerang darah  | 44,2     | Rp.334.850.000,00      |
| 62 | Kerang hijau  | 28,2     | Rp.210.700.000,00      |
| 63 | Cumi-cumi     | 363,4    | RP.8.237.380.000,00    |
| 64 | Sotong        | 284,9    | Rp.5.452.600.000,00    |
| 65 | Gurita        | 56,4     | Rp.440.900.000,00      |
|    | Jumlah        | 42.922,2 | Rp. 497.422.508.005,00 |

Sumber : Data Statistik DKP Kota Probolinggo tahun 2010

#### 4.3.3 Jumlah Nelayan

Tabel 5. Jumlah Nelayan di Kota Probolinggo

| NO | Tipe Nelayan     | Jumlah (Orang) |
|----|------------------|----------------|
| 1  | Nelayan Tetap    | 9439           |
| 2  | Nelayan Sambilan | 112            |
| 3  | Kadang – Kadang  | 910            |
|    | Jumlah           | 10561          |

Sumber : Data Statistik DKP Kota Probolinggo tahun 2010

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah nelayan di kota Probolinggo sebanyak 10561 orang, yang didominasi oleh nelayan tetap yaitu sebanyak 9439 orang. Sedangkan nelayan sambilan sebanyak 112 orang dan nelayan kadang-kadang sebanyak 910 orang.

## 5. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 5.1 Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan

Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan Probolinggo dilakukan sejak tahun 2000 dan telah diresmikan pada tanggal 29 Desember 2007 oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudoyono di Pacitan. Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan Probolinggo adalah untuk menampung dan melayani aktifitas perekonomian perikanan yang dilakukan oleh nelayan pendatang maupun nelayan Kota Probolinggo yang sementara ini masih memanfaatkan Pelabuhan Umum/Niaga Tanjung Tembaga Kota Probolinggo.

Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan terletak di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, berjarak 2 km sebelah Utara dari pusat Kota Probolinggo atau 90 km di sebelah Timur Kota Surabaya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 3.

Adapun mengenai visi dan misi dari Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan adalah sebagai berikut :

Visi : Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan Kota Probolinggo juga mempunyai visi yaitu ***"Meningkatkan Kemampuan Pelabuhan Perikanan Dalam Penyelenggaraan Usaha Perikanan Tangkap Yang Ekonomis"***

Sebagai "peningkatan kemampuan" artinya Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan Kota Probolinggo untuk melaksanakan kegiatan perikanan tangkap dengan menggunakan fasilitas yang telah dimiliki sekarang. "Penyelenggaraan usaha perikanan tangkap yang ekonomis" diartikan sebagai harapan bagi masyarakat perikanan/nelayan, pengusaha besar dan kecil agar

mendapatkan manfaat selama berada di Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan Kota Probolinggo.

Misi : Misi merupakan gerakan kerja dan upaya yang sistimatis, terarah dan berkesinambungan dalam menumbuhkembangkan visinya, untuk itu dalam pengelolaan PPP Mayangan Kota Probolinggo dibutuhkan misi :

- a. Menyediakan fasilitas dan jasa yang berorientasi pada tingkat kebutuhan dan pertumbuhan usaha perikanan;
- b. Mewujudkan pelaksanaan pelayanan prima dan koordinasi dalam tugas operasional;
- c. Terlaksananya pengendalian dan Pengawasan Penangkapan ikan pada Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

Visi dan misi dilanjutkan dalam perencanaan operasional yang strategis untuk meningkatkan koordinasi Pemerintahan antara lain :

- a. Mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif guna menarik dukungan Investor.
- b. Mengembangkan teknologi penangkapan ikan yang produktif dan ramah lingkungan.

Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan mempunyai tujuan dan sasaran tertentu yang sesuai dengan visi dan misi seperti tersebut di atas. Tujuan yang akan dicapai dengan dibangunnya Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan Kota Probolinggo adalah sebagai berikut :

- Penyediaan fasilitas pelabuhan yang mendukung operasional dan pelayanan kapal perikanan.
- Meningkatkan mutu dan kuantitas hasil perikanan.

- Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan serta penyerapan tenaga kerja.
- Meningkatkan peran serta pelabuhan perikanan sebagai fasilitator dalam sektor perikanan.

Sedangkan sasaran yang akan dicapai dengan dibangunnya Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan Kota Probolinggo adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya fasilitas pelabuhan yang sesuai dengan *masterplan*.
- Meningkatkan peran aktif karyawan dalam rangka pelayanan umum kepada pemakai fasilitas pelabuhan perikanan.
- Memfasilitasi peran investor lokal maupun non lokal yang akan berusaha di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan Kota Probolinggo.
- Mengadakan sosialisasi usaha perikanan dan pelelangan ikan di TPI.

## 5.2 Mekanisme Kerja di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan

### 5.2.1 Landasan Hukum

- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
- b. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
- c. SK Menteri Pertanian No.1082/Kpts/OT-210/10/99 tentang Tata Hubungan Kerja UPT Pelabuhan Perikanan dengan instansi terkait dalam pengelolaan Pelabuhan Perikanan.
- d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.08/MEN/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan.



- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.06/MEN/2007 jo Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.19/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan.
- f. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No: 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- g. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 12/MEN/2004 tentang Peningkatan Status Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP).
- h. Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Nomor: 061/6614/116.01/2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja Unit Pengelola Teknis Daerah pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur.

Pembentukan susunan kepengurusan dalam pengelola pelabuhan (UP4) sudah sesuai dengan landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan kepengurusan. Selain itu penarikan retribusi bagi kendaraan yang masuk ke dalam wilayah pelabuhan juga sudah disesuaikan dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No: 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Saat ini UPT (Unit Pelaksana Teknis) Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangansudah diubah dari Balai Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan Kota Probolinggo menjadi Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai (UPPPP) Mayangan Kota Probolinggo sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur nomor 061/6614/116.01/2010 tertanggal Juni 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Teknis Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur.

Penerapan landasan hukum pada Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan belum terlaksana secara optimal, masih ada beberapa penerapan landasan hukum yang belum terlaksana seperti beberapa instansi yang belum ada di pelabuhan (dinas kebersihan yang bertugas untuk menjaga kebersihan lingkungan pelabuhan, kurangnya tenaga kerja/karyawan di pelabuhan, belum berjalannya sistem lelang pada TPI Mayangan).

### 5.2.2 Hubungan Kelembagaan

Pencapaian keberhasilan pelaksanaan operasional kegiatan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan tidak terlepas dari terciptanya hubungan dengan kelembagaan terkait yang berjalan dengan baik. Hubungan kelembagaan ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Hubungan dengan instansi terkait dalam pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan adalah
  - a. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, mempunyai wewenang dan tanggung jawab melaksanakan pembinaan teknis perikanan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dibidang perikanan.
  - b. UPT pelabuhan perikanan (UPPPP) yang mempunyai wewenang dan bertanggung jawab dalam:
    - Menyelenggarakan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pengelolaan sarana pokok dan penunjang yang menjadi asset pemerintah.
    - Menyelenggarakan pelayanan teknis terhadap kapal perikanan serta keamanan, ketertiban dan kebersihan di pelabuhan perikanan.

- Melaksanakan fungsi kesyahbandaran khususnya dalam menertibkan Surat Ijin Berlayar (SIB) bagi kapal perikanan.
- c. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Probolinggo, mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam melaksanakan penyelenggaraan pelelangan ikan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan.
- d. Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), mempunyai wewenang dalam mengawasi kegiatan perikanan tangkap.
- e. Keamanan Laut (KAMLA), mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam melaksanakan pengamanan, penanganan dan penanggulangan kasus-kasus kejahatan umum/kriminal di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan.
- f. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Probolinggo.
- g. Kantor Adpel Perhubungan Laut.

## 2. Hubungan dengan pengusaha swasta

Di dalam PPP Mayangan, belum terdapat industri pengolahan ikan, karena kawasan industri hulu dan hilir masih dalam rencana pembangunan, namun di dalam PPP Mayangan terdapat 24 kios yang digunakan untuk usaha pengepakan ikan. Di area sekitar PPP Mayangan juga tidak terdapat usaha pengalengan ikan dan pengolahan tepung ikan.

Terdapat 8 (delapan) Unit Pengolah Ikan (UPI) berskala besar yang beroperasi di wilayah kerja UPPPP Mayangan, UPI tersebut juga secara rutin melabuhkan kapal di dermaga PPP Mayangan serta mengajukan permohonan penerbitan SKPI/SHTI di UPPPP Mayangan. Produk UPI tersebut didominasi

pembekuan dan fillet ikan untuk pasar ekspor. Data-data UPI tersebut sebagai berikut :

- CV. Pesona Mandiri, Jalan Cumi – Cumi no 10, Kota Probolinggo
- PT. Sukses Lautan Indonesia (Sulindo), Jalan Pelabuhan Tanjung Tembaga Barat, Kota Probolinggo
- CV. Jala Karya Mandiri, Jalan Ikan Paus no 11A, Kota Probolinggo
- UD. Karya Samudra, Jalan Suyoso no. 87, Kota Probolinggo
- CV. Lautan Berlian, Jalan Nusa Indah no. 37, Kota Probolinggo
- UD. Utara Jaya, Jalan Gubernur Suryo I no 17, Kota Probolinggo
- UD. Lautan Jaya, Jalan Cumi – Cumi no 26, Kota Probolinggo
- UD. Napoli, Jalan Pattimura no 74, Kota Probolinggo

Di dalam wilayah Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan tidak terdapat pabrik es, kebutuhan es nelayan dan pengolah ikan disuplai oleh pabrik es yang ada di luar wilayah PPP Mayangan. Ada 4 (empat) pabrik es yang terdaftar menyuplai kebutuhan es di PPP Mayangan, yaitu : PT. Segar Alam, Jember, PT. Sukses Lautan Indonesia (Sulindo), Probolinggo, PT. Aqua Bisnis, Probolinggo, PT. Airmas Lestari Jaya Sentosa, Probolinggo. Fasilitas docking (galangan) kapal di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan masih dalam proses pembangunan, sehingga sementara fasilitas docking yang tersedia di sekitar PPP Mayangan hanya terdapat di Pelabuhan Umum Tanjung Tembaga Kota Probolinggo sebanyak 2 (dua) unit. Fasilitas bengkel kapal di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan masih belum ada, sehingga nelayan menggunakan fasilitas bengkel kapal terdekat dari PPP Mayangan yang terdapat di Pelabuhan Umum Tanjung Tembaga Kota Probolinggo sebanyak 1 (satu) unit dan milik umum/perorangan di Kecamatan Mayangan sebanyak 2 (dua) unit. Di

dalam Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan terdapat 1 (satu) unit SPDN dengan kapasitas tangki pendam sebesar 8.000 liter, selain itu kebutuhan BBM nelayan juga disuplai oleh 1 (satu) unit SPDN di Pelabuhan Tanjung Tembaga Kota Probolinggo.

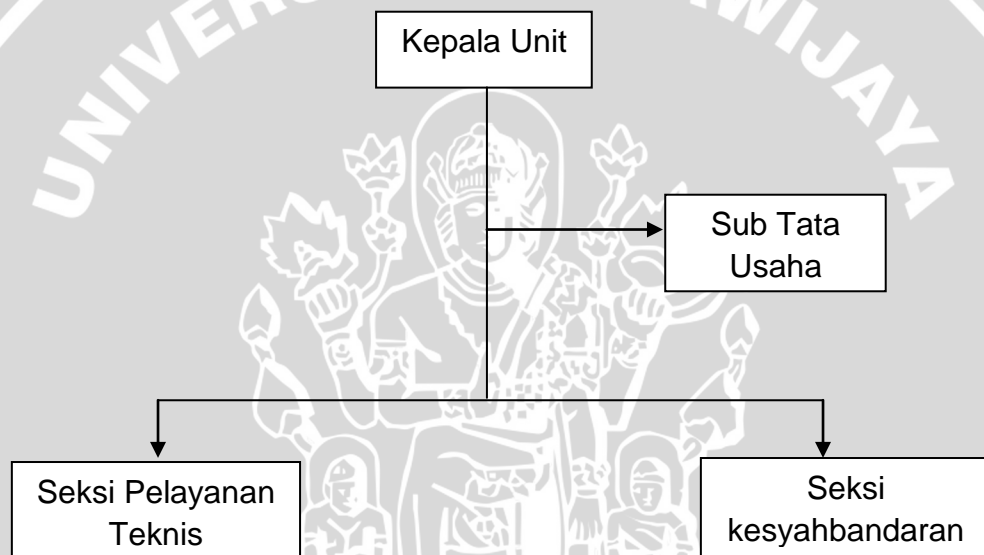
Pengusaha swasta menjadi penyedia bahan-bahan keperluan yang digunakan untuk melaut (menangkap ikan) dan perlakuan hasil tangkapan ikan dari nelayan seperti penyediaan es, sedangkan pihak pelabuhan menyediakan tempat atau ruko. Selain itu dengan belum adanya fasilitas bengkel kapal maka pihak perusahaan swasta menyediakan fasilitas bengkel kapal untuk beroperasi di wilayah Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan.

### **5.2.3 Struktur Organisasi**

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur Nomor : 061.1/1137/118.4/2008 tentang Pembentukan Organisasi Balai Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan Kota Probolinggo. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pengelolaan pelabuhan perikanan pantai, pengawasan penangkapan ikan dan pelayanan teknis kapal perikanan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur.

Kemudian sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur nomor 061/6614/116.01/2010 tertanggal Juni 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Teknis Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, nomenklatur Balai Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan Kota Probolinggo diubah menjadi Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai (UPPPP) Mayangan Kota Probolinggo.

Adapun struktur Organisasi PPP Mayangan Kota Probolinggo sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur nomor 061/6614/116.01/2010, tercantum Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai (UPPPP) Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari Kepala Unit, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pelayanan Teknis dan Seksi Kesyahbandaran, dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Struktur Organisasi PPP Mayangan

(Sumber: Laporan Tahunan UP4)

Dari struktur organisasi tersebut dapat dijelaskan mengenai tugas dari masing-masing bagian sebagai berikut :

- Kepala PPP Mayangan bertugas memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan pengelolaan pelabuhan perikanan pantai, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.
- Sub Bagian Tata Usah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga dan kearsipan; melaksanakan pengelolaan

administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor.

- Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan perencanaan pengembangan dan pelayanan jasa serta pemeliharannya; melaksanakan penyusunan dan penyiapan rencana program pelaksanaan penyelenggaraan keamanan serta koordinasi pemanfaatan sarana pelabuhan; menyusun penyusunan dan penyiapan rencana program pelaksanaan koordinasi pengawasan mutu hasil perikanan; melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta evaluasi terhadap penggunaan jasa pelabuhan perikanan; melaksanakan penyusunan laporan hasil penyelenggaraan pelayanan teknis.
- Seksi Kesyahbandaran mempunyai tugas Memeriksa ulang kelengkapan dan keabsahan kapal akan kelaut; memeriksa ulang alat penangkap ikan dan alat bantu penangkap ikan diatas kapal perikanan; pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan dari aspek pelayaran; memeriksa persyaratan ABK sesuai dengan aturan disektor perikanan; tugas lain dalam memfungsikan alur dan dermaga meliputi (mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan, mengatur olah gerak dan lalu lintas kapal perikanan di pelabuhan perikanan, menerbitkan SIB kapal perikanan di pelabuhan perikanan).

#### **5.2.4 Jumlah Pegawai**

Jumlah Pegawai PPP Mayangan Kota Probolinggo dalam tahun 2010 sebanyak 19 orang yang terdiri dari 8 orang PNS dan 11 orang tenaga kontrak.

Kegiatan proses mutasi kepegawaian pada PPP Mayangan Kota Probolinggo dalam tahun 2010 meliputi kenaikan pangkat reguler sebanyak 2

orang, kenaikan gaji berkala sebanyak 4 orang, mutasi alih tugas sebanyak 2 orang dan penempatan CPNS sebanyak 2 orang.

### 5.2.5 Pembinaan/ Pengembangan Pegawai

Untuk lebih meningkatkan disiplin dan kreatifitas Pegawai di PPP Mayangan Kota Probolinggo, maka dilakukan pembinaan secara rutin melalui kegiatan-kegiatan antara lain :

- a. Pembinaan dalam rangka peningkatan disiplin kerja pegawai yang dilaksanakan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- b. Pembinaan yang dilakukan oleh Kepala PPP Mayangan Kota Probolinggo kepada Staf melalui pengarahan pada waktu apel atau pada waktu tertentu yang dianggap penting/mendesak yang menyangkut pelaksanaan tugas sehari-hari atau evaluasi kegiatan dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.
- c. Pembinaan untuk meningkatkan ketrampilan yaitu dengan cara mengikutsertakan Pegawai PPP Mayangan Kota Probolinggo dalam pelatihan yang diadakan baik oleh Departemen Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur maupun Instansi lain.

Dalam tahun 2010 Peningkatan Pelatihan/keterampilan yang diikuti oleh Kepala dan karyawan/karyawati UPPPP Mayangan sebagai berikut :

- Penjelasan penerapan SHTI dan pengumpulan spesimen tanda tangan Otoritas Kompeten Lokal tanggal 15 Januari 2010
- Rapat Pengelolaan APBD tanggal 24-25 Februari 2010
- Rapat Pembahasan Rencana target PAD tanggal 22 Februari 2011

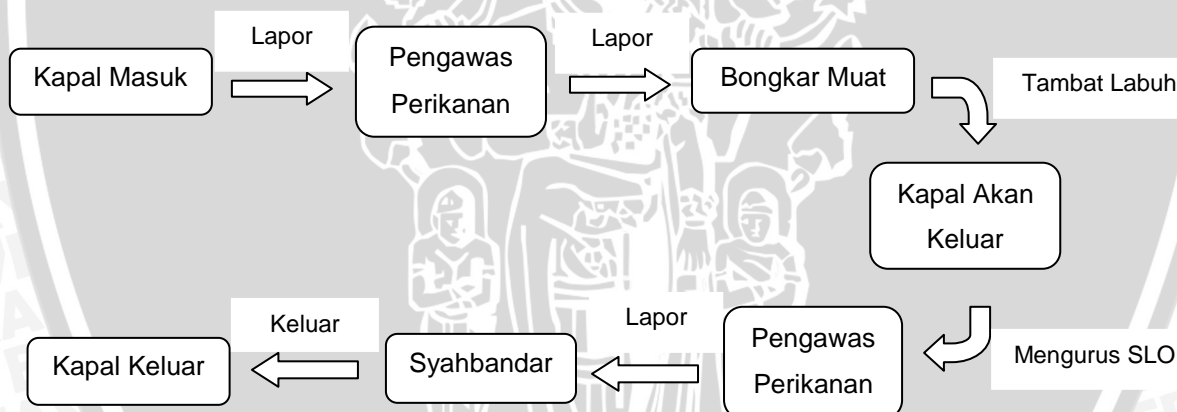


- Evaluasi pelaksanaan pencatatan harga ikan di Kabupaten/UPT tahun 2009 dan Rencana pelaksanaan tahun 2010 tanggal 9 Maret 2010
- Raker Dinas Perikanan dan Kelautan se-Jatim tanggal 21-23 Maret 2010
- Pertemuan Koordinasi dan Sinkronisasi Aparan PH tanggal 24-25 Maret 2010
- Penyusunan Renstra tanggal 31-2 Juni 2010
- Pembinaan Kesyahbandaran Tahun 2010 tanggal 13-14 Juli 2010
- Evaluasi Pelaksanaan SHTI tanggal 22-23 Juli 2010
- Pemantapan PNS dan CPNS oleh Kadiskanla Prov. Jatim tanggal 30 Juli 2010
- Pelatihan Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan dan Kelautan tanggal 26 – 27 Juli 2010
- Bimbingan Teknis Kesyahbandaran tanggal 28 September-1 Oktober 2010
- Bimbingan Operator dan Enumerator PIPP tanggal 29 September-2 Oktober 2010
- Sosialisasi Persyaratan Ekspor Hasil Perikanan ke Negara Mitra tanggal 12-13 Oktober 2010
- Pelatihan Pengisian SLO bagi Pengawas Perikanan tanggal 25-26 Oktober 2010
- Pendidikan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan tanggal 2 Nopember-6 Desember 2010
- Pertemuan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja tanggal 4-5 Nopember 2010
- Diklat Prajabatan Golongan III tanggal 10-30 Nopember 2010
- Pelatihan Operator Sistem Informasi Otomasi Penerbitan SHTI tanggal 14-16 Nopember 2010
- Focus Group Discussion tanggal 19 Nopember 2010

- Magang Petugas di PT. Perikanan Nusantara Benoa Bali tanggal 22-25 Nopember 2010.

### 5.2.6 Mekanisme Kerja Dalam Kegiatan Bongkar Muat Ikan

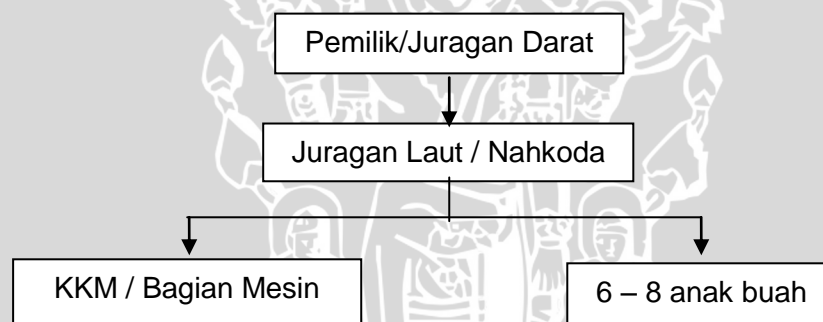
Kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan dari dan ke kapal merupakan salah satu mata rantai kegiatan pengangkutan melalui laut. Kegiatan bongkar muat kapal adalah proses pembongkaran dari atas dek dan menempatkannya di atas dermaga atau kedalam tongkang atau sebaliknya. Dari pengertian bongkar muat kapal di atas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya bongkar muat kapal tersebut merupakan kegiatan pemindahan barang angkutan, baik dari kapal pengangkut ke dermaga atau ke tongkang maupun sebaliknya dari dermaga atau tongkang ke atas dek kapal pengangkut.



Gambar 3. Skema /Alur Prosedur Pada Kapal Masuk Untuk Melakukan Bongkar Muat

Dari gambar 3 di atas dapat dijabarkan skema/alur pada kapal masuk untuk melakukan bongkar muat sebagai berikut, kapal masuk ke areal dermaga pelabuhan yang kemudian melaporkan kedatangannya kepada pengawas perikanan (pengawas dari syahbandar). Syahbandar memberikan ijin untuk masuk ke areal pelabuhan dan memberikan tempat untuk nyandarkan kapalnya. Sebelum melakukan bongkar muat di dermaga yang telah disediakan oleh pihak pelabuhan perikanan, pemilik kapal melaporkan kedatangannya pada Tempat

Pelelangan Ikan (TPI). Jika kapal akan keluar harus mengurus Surat Laik Operasi (SLO) ke Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) agar dapat melakukan pelayaran lagi. Syarat-syarat yang diperlukan untuk memperoleh SLO yaitu fotocopy SIUP, SIPI/SIKPI, PAS tahunan KELAIKAN dan PENGAWAKAN, Surat ukur, Gross akta, Surat Keterangan VMS off( $\leq 60$  GT)/on( $\geq 60$  GT) Line. Setelah mendapatkan SLO, kapal melapor ke syahbandar untuk mengurus Surat Ijin Berlayar (SIB). Setelah mendapatkan SIB dari syahbandar maka kapal dapat melakukan pelayaran lagi. Dari hasil observasi dan wawancara dengan beberapa pemilik kapal dan anak buah kapal (ABK), maka dapat diketahui struktur organisasi dari nelayan jonggrang pada gambar 4.

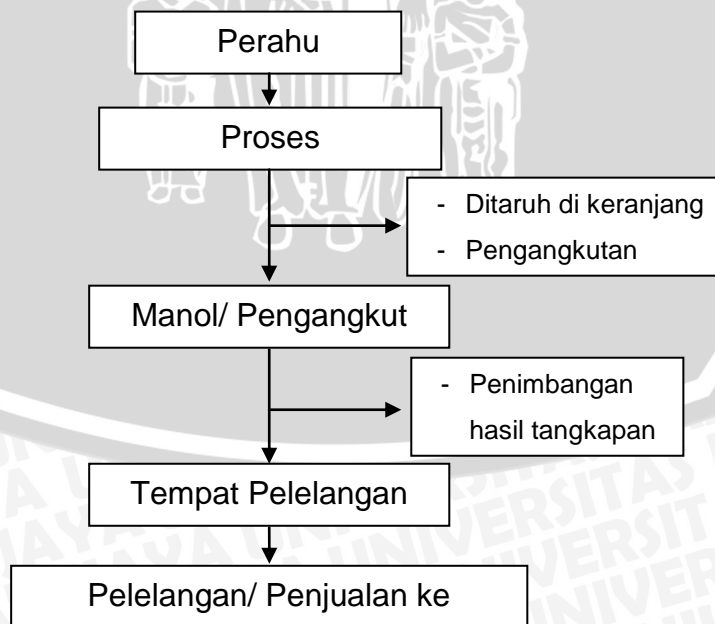


Gambar 4. Struktur Organisasi Pada Nelayan Jonggrang

Dari struktur organisasi tersebut dapat dilihat pemilik (juragan darat) sebagai pemimpin dan membawahi juragan laut (nahkoda). Juragan laut/nahkoda adalah orang yang menjalankan kemudi. Pekerjaan ini sangat berat dan berisiko tinggi karena berkaitan dengan keselamatan semua awak kapal, maka pekerjaan ini diberikan kepada orang yang betul-betul sudah berpengalaman dibidangnya dan juga mendapatkan bagian yang lebih besar dari ABK yang lainnya. Juragan laut/nahkoda membawahi 1 KKM/bagian mesin dan 6-8 anak buah kapal. Bagian mesin bertugas untuk menjaga mesin dan

mengoperasikannya. Sedangkan ABK lainnya bertuga untuk menata jaring, menarik jaring pada waktu penangkapan berlangsung, selain itu mereka juga bertugas untuk menguras kapal pada waktu kapal bersandar di dermaga.

Dari hasil observasi dan wawancara dengan beberapa pemilik kapal dan anak buah kapal (ABK) dapat diketahui mekanisme bongkar muat ikan bahwa setelah perahu berlabuh maka proses pembongkaran dilakukan oleh ABK. Setelah itu hasil ditaruh dikeranjang oleh manol/tenaga pengangkut diangkut dan ditimbang. Proses penimbangan ini diawasi langsung oleh perwakilan dari juragan darat (orang yang dipercaya langsung oleh pemilik kapal). Proses penimbangan dilakukan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Kenyataan yang terjadi di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Manyangan proses penjualan hasil melaut tidak melalui pelelangan melainkan terjadi kesepakatan terlebih dahulu dengan pedagang/tengkulak sebelum berangkat melaut, sehingga hasil laut setelah dilakukan proses penimbangan langsung dibawa oleh pedagang/ tengkulak tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 5.



Gambar 5. Mekanisme Kerja Bongkar Muat Ikan



Gambar 6. Proses Pembongkaran      Gambar 7. Proses Pengangkutan Ikan

Dari hasil observasi dan wawancara dengan beberapa pemilik kapal dan anak buah kapal (ABK), maka dapat diketahui sistem bagi hasil yang di terapkan pada nelayan jonggrang adalah sebagai berikut: pemilik kapal/juragan darat mendapatkan 50% dari hasil tangkapan yang diperoleh pada saat melaut. Kemudian juragan laut/nahkoda mendapatkan 40% dari sisa hasil yang sudah dipotong oleh pemilik kapal. Sedangkan sisanya dibagi rata untuk ABK yang lain.

### **5.3 Peran Dan Fungsi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan Dalam Pengembangan Kegiatan perikanan nelayan**

#### **5.3.1 Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan**

Adapun sarana dan prasarana yang ada di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan dikelompokkan menjadi tiga yaitu fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang. Untuk lebih lengkapnya sebagai berikut:

##### **1) Fasilitas Pokok**

Fasilitas pokok merupakan sarana dalam penyelenggaraan dan operasional Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan. Fasilitas pokok ini digunakan untuk menjamin keselamatan umum, termasuk juga untuk kegiatan perikanan seperti tempat berlabuh, tempat tambat dan bongkar muat hasil

perikanan. Dalam pemanfaatan fasilitas pokok ini harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk pengembangan dan penambahan fasilitas pokok sedapat mungkin terus dilakukan sejalan dengan pengembangan dan peningkatan operasional pelabuhan yang dibutuhkan.

Tabel 6. Fasilitas Pokok Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan

| NO | Fasilitas                           | Jumlah/<br>volume                               | Keterangan                        | Fungsi  |
|----|-------------------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 1  | Lahan/Tanah                         | 20 Ha   | Kondisi baik                      | Lahan pengembangan pelabuhan  |
| 2  | Breakwater/<br>Pemecah<br>Gelombang | P= 925 m<br>L= 8 m                              | Kondisi baik                      | Melindungi armada-armada penangkapan yang ada di areal kolam pelabuhan dari gelombang/ombak besar |
| 3  | Dermaga 1<br><br>Dermaga 2          | P = 700 m<br>L = 9 m<br><br>P = 75 m<br>L = 6 m | Belum lengkap<br><br>Kondisi baik | Mendaratkan ikan hasil tangkapan sebelum dibawa ke TPI untuk dilelang                             |
| 4  | Jalan Pelabuhan                     | P=1000 m<br>L = 8 m                             | Kondisi baik                      | Sarana untuk memperlancar distribusi hasil perikanan dan distribusi bahan perbekalan nelayan      |
| 5  | Revetment                           | P = 700 m                                       | Kondisi baik                      | Jalan untuk menuju ke tempat di mana armada-  |

|   |                 |                       |                |  |
|---|-----------------|-----------------------|----------------|--|
|   |                 | L = 8 m               |                | armada penangkapan milik nelayan ditambatkan   |
| 6 | Kolam Pelabuhan | 20.000 m <sup>2</sup> | Belum sempurna | Tempat tambat labuh bagi armada penangkapan yang beroperasi di pelabuhan   |
| 7 | Alur Pelayaran  | P= 700 m<br>L = 8 m   | Kondisi baik   | Bagian perairan yang berfungsi sebagai jalan masuk atau keluar bagi kapal-kapal yang akan memasuki kolam pelabuhan menuju ke dermaga |

Sumber: Laporan Tahunan 2010 UPPP Mayangan

Beberapa fasilitas pokok yang dimiliki oleh Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan sebagai berikut:

b. Lahan

Lahan yang dimiliki oleh Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan memiliki luas 20 Ha. Sebagian besar lahan yang dimiliki oleh Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan ini masih belum termaksimalkan dalam penggunaannya karena masih belum rampungnya pembangunan prasarana di lingkungan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan.

c. Breakwater (Pemecah gelombang)

Breakwater merupakan suatu bangunan yang terdiri dari kumpulan batu-batu besar yang tertata sedemikian rupa, yang berada di sekeliling kolam pelabuhan. Breakwater berfungsi untuk melindungi kolam pelabuhan, khususnya kapal-kapal yang akan berlabuh, dari pengaruh gelombang atau ombak besar, sehingga kapal-kapal tersebut aman dalam melakukan kegiatan bongkar-muat.

Pembangunan breakwater dimulai pada tahun 2000 dengan jenis konstruksi menggunakan batu tumpukan (caison) yang memiliki panjang 925 meter dan lebar 3 meter.



Gambar 8. Breakwater (Pemecah gelombang)

d. Dermaga

Dermaga adalah suatu tempat pendaratan ikan yang ada di pelabuhan. Dermaga digunakan untuk mendaratkan ikan hasil tangkapan sebelum dibawa masuk ke TPI untuk dilelang. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan memiliki 2 dermaga yaitu dermaga landing beach dan dermaga PIER. Dermaga landing beach dibangun pada tahun 2003 yang saat ini masih belum lengkap dan dalam proses pembangunan (rehabilitasi). Dermaga pelabuhan ini memiliki panjang 700 meter dan lebar 9 meter yang dilengkapi dengan fender dari baja sebagai tempat mengaitkan tali agar armada tidak hanyut saat ditambatkan. Dermaga PIER dibangun pada tahun 2002 yang sudah siap beroperasi. Dermaga ini memiliki panjang 75 meter dengan lebar 6 meter dan dilengkapi dengan fender dan lampu.

Jenis konstruksi pada dermaga ini terbuat dari cor dengan jenis fender yang terbuat dari kayu ulin.





Gambar 9. Dermaga

e. Jalan

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan membangun jalan pelabuhan dengan panjang 1000 meter dan lebar 8 meter dengan jenis konstruksi cor tulangan yang dibangun pada tahun 2006. Jalan pelabuhan dibangun sebagai sarana untuk memperlancar distribusi hasil perikanan dan distribusi bahan perbekalan maupun barang-barang lain yang diperlukan bagi armada penangkapan dan masyarakat nelayan.



Gambar 10. Jalan

f. Revetment

Revetment merupakan bangunan pelindung pantai yang dibuat dalam arah sejajar garis pantai, yang mempunyai fungsi utama untuk mengendalikan laju angkutan sedimen dalam arah tegak lurus pantai (*cross-shore sediment*

*transport*) sehingga lahan pantai di belakang revetment terlindungi. Revetment ini dibangun pada tahun 2000 dengan jenis konstruksi batu kosong 60-100 dan dalam kondisi yang baik. Revetment pada Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan memiliki panjang 700 meter dan lebar 8 meter.



Gambar 11. Revetment

g. Kolam Pelabuhan

Kolam pelabuhan merupakan lokasi perairan tempat kapal berlabuh, mengisi perbekalan, atau melakukan aktivitas bongkar-muat hasil tangkapan ikan. Kolam pelabuhan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan dibangun pada tahun 2000. Kolam pelabuhan ini memiliki luas 20.000 m<sup>2</sup> dengan lebar mulut kolam 150 meter dan kedalaman -2 meter. Kondisi kolam pelabuhan ini masih belum sempurna karena rencana pembangunan kolam pelabuhan ini memerlukan kedalaman -4 meter, sehingga masih diperlukan pengerukan lagi.



Gambar 12. Kolam Pelabuhan

#### h. Alur Pelayaran

Alur pelayaran merupakan bagian perairan pelabuhan yang berfungsi sebagai jalan masuk atau keluar bagi kapal-kapal yang akan memasuki kolam pelabuhan menuju ke dermaga. Alur pelayaran di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan dibangun pada tahun 2000 dengan panjang 700 meter dan lebar 8 meter sedangkan kedalamannya -5 meter.

#### 2) Fasilitas Fungsional

Fasilitas fungsional merupakan fasilitas yang difungsikan dalam penyelenggaraan operasional pelabuhan, yang mana keberadaan fasilitas ini sangat erat hubungannya dengan masyarakat nelayan dan pengguna jasa pelabuhan lainnya yang memanfaatkan pelayanan pelabuhan. Adanya pengembangan dan pembangunan fasilitas fungsional, diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat nelayan dan pengguna jasa pelabuhan lain dalam kegiatan perikanan di lingkungan pelabuhan.

Tabel 7. Fasilitas Fungsional Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan

| NO | Fasilitas                     | Jumlah/<br>volume | Keterangan   | Fungsi  |
|----|-------------------------------|-------------------|--------------|---|
| 1  | Kantor Administrasi Pelabuhan | 20 m <sup>2</sup> | Kondisi baik | Tempat operasional pegawai pelabuhan  |
| 2  | Rambu Pelayaran               | 1 unit            | Kondisi baik | Sebagai alat bantu navigasi pelayaran di lingkungan pelabuhan               |
| 3  | Lampu Suar                    | 2 unit            | Kondisi baik | Mempermudah nelayan atau pelayaran lain untuk masuk menuju ke areal dermaga |

|   |                                    |                         |              |   |
|---|------------------------------------|-------------------------|--------------|---|
| 4 | Sumber air bersih (air tawar)      | 5 m <sup>3</sup> /detik | Kondisi baik | Penyediaan pelayanan berupa air tawar                             |
| 5 | Genset                             | 50 kVA                  | Kondisi baik | Kebutuhan perkantoran, penerangan jalan                           |
| 6 | BBM                                | 8 liter                 | Lewat SPDN   | Tempat pelayanan bahan perbekalan BBM, seperti bensin dan solar   |
| 7 | Tempat Parkir                      | 20m <sup>2</sup>        | Kondisi baik | Sebagai tempat parker kendaraan yang masuk areal pelabuhan        |
| 8 | Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) | Kapasitas 10 ton        | Kondisi baik | Sebagai tempat pengolahan limbah pelabuhan                        |
| 9 | Tempat Pelelangan Ikan (TPI)       | 400 m                   | Kondisi baik | Tempat melakukan kegiatan pelelangan ikan hasil tangkapan nelayan |

Sumber: Laporan Tahunan 2010 UPPP Mayangan

Beberapa fasilitas fungsional yang dimiliki oleh Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan sebagai berikut:

a. Kantor Administrasi Pelabuhan

Kantor pelabuhan yang dimiliki oleh Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan dibangun pada tahun 2000 dengan luas 20 m<sup>2</sup>. Bangunan kantor pelabuhan merupakan bangunan permanen yang kondisinya baik, yaitu dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Gambar 13. Kantor Administrasi Pelabuhan

b. Rambu Pelayaran

Rambu pelayaran merupakan alat bantu navigasi pelayaran yang pada umumnya terdapat di wilayah perairan sekitar pelabuhan, seperti pelampung, buo navigasi, bendera, dan lain-lain. Rambu pelayaran yang di miliki oleh Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan berupa lampu pandu alur yang dibangun pada tahun 2009, dimana kondisinya baik dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

c. Lampu Suar

Lampu suar merupakan alat bantu navigasi dan pelayaran berupa lampu yang pada umumnya ditempatkan di menara, sehingga dapat terlihat dari kejauhan oleh kapal yang hendak menuju ke pelabuhan. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan memiliki 2 unit lampu suar yang dibangun pada tahun 2009 dengan konstruksi berupa tiang besi cor.



Gambar 14. Lampu Suar

d. Sumber Air Bersih (air tawar)

Sumber air bersih (air tawar) di areal Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan berasal dari Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) dengan debit 5 m<sup>3</sup>/detik. Air ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan warung serba ada, kios/toko yang terdapat di lingkungan pelabuhan.

e. Genset

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan memiliki 1 unit genset dengan kondisi baik dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya yang digunakan untuk kebutuhan perkantoran dan penerangan jalan. Genset yang dimiliki oleh Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan dapat menghasilkan 50 kVA.



Gambar 15. Gedung Mesin Genset

f. BBM

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan memiliki stasiun pengisian bahan bakar yang dikhususkan bagi keperluan nelayan. Khusus untuk bahan bakar Solar, terdapat pula layanan bahan bakar yang disebut SPDN (Solar Packed Dealer Nelayan). Instalasi BBM ini dibangun pada tahun 2005 yang memiliki 1 buah tangki dengan kapasitas tangki pendam sebesar 8.000 liter.



Gambar 16. SPBN

g. Tempat Parkir

Tempat parkir kendaraan bermotor di lingkungan pelabuhan perikanan yang dapat digunakan oleh umum ini memiliki luas 20 m<sup>2</sup> dengan konstruksi lantai yang terbuat dari cor. Tempat parkir ini dibangun pada tahun 2005 yang kondisinya sampai pada saat ini masih baik.



Gambar 17. Tempat Parkir

#### h. Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL)

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan memiliki fasilitas pengolahan limbah cair ikan berupa konstruksi beton bertulang, pasangan batu kali, tanah urug, dan konstruksi baja yang ditempatkan di dekat TPI. Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) ini dibangun pada tahun 2009 yang memiliki luas bangunan 100 m<sup>2</sup> dengan kapasitas sebesar 10 ton per hari.



Gambar 18. Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL)

#### i. Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan didukung dengan fasilitas operasional berupa Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang memiliki luas 400 m<sup>2</sup>. Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) ini dibangun pada tahun 2004. Kondisi dari bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) ini dalam keadaan baik dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Pada saat ini sistem lelang di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Saat ini ikan hasil tangkapan nelayan masih dijual dengan cara tawar menawar antara nelayan dengan penjual./ pedagang ikan. Selain itu ikan hasil tangkapan nelayan sudah memiliki langganan yang akan membeli ikan tersebut.





Gambar 19. Tempat Pelelangan Ikan

### 3) Fasilitas Penunjang

Fasilitas penunjang merupakan sarana pelengkap yang mendukung keberadaan penggunaan dari fasilitas pokok dan fasilitas fungsional. Fasilitas ini secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat umum. Dengan adanya fasilitas penunjang ini diharapkan kegiatan operasional yang diselenggarakan oleh Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan dapat berjalan dengan baik dan optimal sehingga sasaran pelayanan yang ingin dicapai Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan dapat terpenuhi. Beberapa fasilitas penunjang yang ada di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan sebagai berikut:

Tabel 8. Fasilitas Penunjang Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan

| NO | Fasilitas | Jumlah/<br>volume | Keterangan          | Fungsi   |
|----|-----------|-------------------|---------------------|--|
| 1  | Pos Jaga  | 9 m <sup>2</sup>  | Kondisi kurang baik | Tempat menjaga keamanan di sekitar pelabuhan               |
| 2  | MCK       | 18 m <sup>2</sup> | Kondisi baik        | Sebagai fasilitas pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan |

|   |                                |                    |                         |   |
|---|--------------------------------|--------------------|-------------------------|---|
| 3 | Kios/toko/warung               | 30 m <sup>2</sup>  | Kondisi baik            | Tempat menjual makanan dan minuman untuk nelayan dan pengunjung pelabuhan |
| 4 | Pasar ikan                     | 100 m <sup>2</sup> | Bangunan bukan permanen | Sebagai tempat menjual ikan hasil tangkapan                               |
| 5 | Musholla                       | 100 m <sup>2</sup> | Kondisi baik            | Sebagai tempat ibadah   |
| 6 | Gedung Pertemuan Nelayan       | 300 m <sup>2</sup> | Kondisi baik            | Sebagai tempat pertemuan nelayan  |
| 7 | Tempat Pembuangan Sampah (TPS) | 2 unit             | Kondisi baik            | Sebagai tempat pembuangan sampah  |

Sumber: Laporan Tahunan 2010 UPPP Mayangan

Beberapa fasilitas fungsional yang dimiliki oleh Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan sebagai berikut:

a. Pos Jaga

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan memiliki pos tempat petugas keamanan berjaga di lingkungan pelabuhan perikanan. Pos Jaga ditempatkan di tempat-tempat strategis seperti pintu masuk pelabuhan. Pos jaga yang dimiliki oleh Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan dibangun pada tahun 2008 yang merupakan bangunan permanen namun. Kondisi dari bangunan pos jaga ini kurang baik, bangunan ini memiliki luas 9 m<sup>2</sup>. Pos jaga digunakan sebagai tempat penarikan retribusi atau pemungutan uang pas masuk pelabuhan dan pos keamanan dilingkungan pelabuhan.

b. MCK

Kamar mandi (MCK) di lingkungan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan dibangun pada tahun 2007. Kamar mandi (MCK) seluas 18 m<sup>2</sup> yang dimiliki oleh Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan ini dalam kondisi kurang baik dikarenakan target pembangunan dari kamar mandi (MCK) ini adalah seluas 36 m<sup>2</sup>. Kamar mandi (MCK) ini digunakan sebagai sarana mandi, cuci dan kakus yang ada di lingkungan pelabuhan.

c. Kios/toko/warung

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan memiliki 28 unit kios/toko/warung dengan luas 30 m<sup>2</sup> yang dibangun pada tahun 2009. Bangunan ini merupakan bangunan permanen dengan kondisi yang baik. Kios/toko/warung ini menjual bahan-bahan kebutuhan pokok di lingkungan pelabuhan.

d. Pasar Ikan

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan menyediakan pasar ikan di dalam lingkungan pelabuhan perikanan. Hal ini bertujuan untuk menarik para nelayan dan pedagang ikan agar melakukan aktivitas usaha di lingkungan pelabuhan perikanan. Pasar ikan yang di sediakan oleh Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan bukan merupakan bangunan permanen, jadi pasar ikan di dalam pelabuhan hanya untuk sementara waktu saja. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan berencana akan memindahkan pasar ikan tersebut di luar pelabuhan perikanan agar lingkungan di dalam pelabuhan perikanan tetap bersih.

e. Musholla

Masyarakat nelayan di kota Probolinggo mayoritas adalah muslim, sehingga kehadiran suatu tempat ibadah berupa musholla merupakan suatu

kebutuhan pokok. Oleh sebab itu Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan menyediakan fasilitas berupa musholla dilingkungan pelabuhan.

f. Gedung Pertemuan Nelayan

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan memiliki gedung pertemuan nelayan dengan luas 300 m<sup>2</sup> yang selesai dibangun pada tahun 2008. Kondisi dari bangunan ini baik dan merupakan bangunan permanen. Bangunan ini digunakan sebagai tempat pertemuan para nelayan, selain itu digunakan sebagai tempat penyuluhan kepada nelayan yang dilakukan oleh pihak Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan. Rencana pengembangan usaha dari Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan ini akan menggunakan (menyewakan) bangunan ini sebagai gedung serba guna yang dapat digunakan oleh umum.

g. Tempat Pembuangan Sampah (TPS)

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan direncanakan dengan harapan menjadi pelabuhan perikanan yang bersih, teratur dan nyaman. Oleh sebab itu segala macam sampah-sampah harus dikumpulkan pada satu lokasi tertentu, yaitu di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang lokasinya di sebelah belakang tempat penjemuran jala.

### 5.3.2 Peran Dan Fungsi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang pengelolaan pelabuhan perikanan pantai, pengawasan penangkapan ikan dan pelayanan teknis kapal perikanan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur. Pelabuhan perikanan bertugas melaksanakan fasilitasi produksi dan pemasaran hasil perikanan di wilayahnya, pengawasan pemanfaatan sumber

daya ikan untuk pelestariannya, dan kelancaran kegiatan kapal perikanan, serta pelayanan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan.

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan memiliki peran sebagai terminal penghubung kegiatan usaha di laut dan di darat ke dalam suatu sistem usaha yang berdaya guna tinggi. Peran pelabuhan sebagai pusat aktivitas produksi ikan sudah berjalan dengan baik, dari data yang diperoleh dari Unit Pelaksana Pelabuhan Perikanan Pantai (UP4) Mayangan jumlah ikan yang sudah diproduksi di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan sebanyak 11.427.173 kg selama tahun 2010. Selain itu peran sebagai pusat aktivitas distribusi juga sudah berjalan dengan baik. Hasil produksi ikan dari nelayan ini didistribusikan ke kota Probolinggo sendiri dan kota-kota disekitarnya seperti kota Malang, Surabaya, Tulungagung, Banyuwangi, Madura, dan Jember. Peran pelabuhan sebagai pusat kegiatan masyarakat nelayan sudah berjalan baik, mulai dari kegiatan bongkar muat kapal ikan, kegiatan jual beli ikan yang dilakukan di TPI, dan kegiatan pengepakan ikan yang akan dikirim keluar kota.

Dalam melaksanakan tugasnya, pelabuhan perikanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perencanaan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian serta pendayagunaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan.
2. Pelayanan teknis kapal perikanan dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan.
3. Pelayanan jasa dan fasilitas usaha perikanan.
4. Penyusunan rencana pelaksanaan dan penyelenggaraan serta pembinaan pelayanan teknis kapal perikanan

5. Pelaksanaan fasilitas dan koordinasi di wilayahnya untuk peningkatan produksi, distribusi dan pemasaran hasil perikanan.
6. Melaksanakan pengawasan penangkapan sumber daya ikan, dan penanganan, pengolahan, pemasaran serta pengendalian mutu hasil perikanan.
7. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perikanan, serta pengelolaan sistem informasi.
8. Pelaksanaan urusan keamanan, ketertiban dan pelaksanaan kebersihan kawasan pelabuhan perikanan.

Dari perencanaan fungsi seperti di atas dapat dijelaskan tentang kegiatan yang sudah dilakukan oleh Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan meliputi:

- a. Perencanaan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian serta pendayagunaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, kegiatannya sampai tahun 2010 ini antara lain:
  - Pembangunan lanjutan kantor pelabuhan.
  - Pembangunan lanjutan balai penyuluhan pelabuhan.
  - Pembangunan elevated water reservoir.
  - Pembangunan dermaga PIER 2.
  - Pembangunan saluran darainase.
  - Pengerukan kolam pelabuhan (kurang -2 meter).
- b. Pelayanan jasa dan fasilitas usaha perikanan, kegiatan yang dilakukan oleh Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan antara lain:
  - Pendarantan Ikan.

- Di dalam wilayah Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan tidak terdapat pabrik es, kebutuhan es nelayan dan pengolah ikan disuplai oleh pabrik es yang ada di luar wilayah PPP Mayangan. Ada 4 (empat) pabrik es yang terdaftar menyuplai kebutuhan es di PPP Mayangan, yaitu PT. Segar Alam, Jember; PT. Sukses Lautan Indonesia (Sulindo), Probolinggo; PT. Aqua Bisnis, Probolinggo; PT. Airmas Lestari Jaya Sentosa, Probolinggo.
  - Sewa peralatan perikanan yang berupa gerobak, peti/keranjang ikan, box fiber.
  - Jasa kebersihan kolam labuh, tapi saat ini jasa kebersihan baru dikenakan pada kapal berukuran 20 GT keatas.
- c. Penyusunan rencana pelaksanaan dan penyelenggaraan serta pembinaan pelayanan teknis kapal perikanan, kegiatan yang dilakukan oleh Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan antara lain:
- Mensosialisasikan penggunaan SHTI bagi UPI yang ada di Kota Probolinggo khususnya yang mendaratkan ikannya di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan. Sosialisasi dilakukan diantaranya pada kegiatan Workshop Catch Certificate. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan telah menerbitkan 18 eksemplar SHTI yang terdiri dari Lembar Awal, Lembar Turunan dan Lembar Turunan yang Disederhanakan.
- d. Pelayanan teknis kapal perikanan dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan, kegiatan yang dilakukan oleh Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan antara lain:

- Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan sudah melayani/mengeluarkan Surat Ijin Berlayar (SIB) berdasarkan Surat Laik Operasi (SLO) yang diterbitkan oleh Satker Pengawas Perikanan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI yang ditugaskan di DKP Kota Probolinggo.
- e. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perikanan, serta pengelolaan sistem informasi, kegiatan yang telah dilakukan antara lain:
  - Operasional pengumpulan data statistik perikanan tangkap.
  - Pembuatan laporan statistik perikanan tahunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan.
  - Pembuatan laporan tahunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan.
- f. Dalam pelaksanaan urusan keamanan, ketertiban kawasan pelabuhan perikanan, Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan telah bekerja sama dengan TNI AL yang dinamakan Satuan Keamanan Laut Terpadu (SAT KAMLADU). Sedangkan untuk masalah kebersihannya, pegawai pelabuhan melaksanakannya dengan cara gotongroyong dikarenakan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan belum bekerja sama dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Probolinggo.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan, masih terdapat fungsi pelabuhan perikanan yang masih belum dijalankan sesuai dengan tugasnya yang meliputi: Pelaksanaan pengawasan penangkapan sumber daya ikan, dan penanganan, pengolahan, pemasaran serta pengendalian mutu hasil perikanan; pelaksanaan dalam urusan



kebersihan; Pelaksanaan fasilitasi hasil produksi dan pemasaran hasil perikanan diwilayahnya.

#### **5.4 Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan Dalam Peningkatan Peran Dan Fungsi Pelabuhan**

Pelaksanaan kegiatan perasional pelabuhan dalam kenyataannya akan memiliki faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kegiatan operasional pelabuhan.

##### **5.4.1 Faktor Pendukung Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan**

Dari hasil observasi dan wawancara dengan beberapa pegawai Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan, maka diperoleh faktor-faktor pendukung kelancaran dan keberhasilan kegiatan operasional yang ada di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan diantaranya:

- ❖ Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan berada pada lokasi yang strategis karena terletak diantara kawasan industri dan tambak milik DKP serta dekat dengan pusat kota Probolinggo. Adanya kedekatan lokasi Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan tersebut merupakan kekuatan besar bagi perkembangan usaha dikawasan pelabuhan.
- ❖ Adanya sumber dana pengembangan dari pusat (Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap) untuk kelancaran maupun kegiatan pengembangan operasional lebih lanjut dari Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan.
- ❖ Adanya pembinaan dan peningkatan ketrampilan staf/pegawai Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan melalui kegiatan-kegiatan yang diberikan dan didukung dari kantor pusat berupa pelatihan, diklat, pembinaan dan lain sebagainya.

#### 5.4.2 Faktor Penghambat Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan

Selain faktor-faktor pendukung pelaksanaan kegiatan operasional tersebut, dalam menjalankan tugasnya Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan juga menghadapi beberapa masalah yang menghadang dalam kegiatan operasionalnya. Berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara dengan beberapa pegawai Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan, diperoleh faktor-faktor penghambat dan belum optimalnya kegiatan operasional yang ada di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan diantaranya:

- ❖ Kondisi fasilitas sarana dan prasarana di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan yang masih dalam tahap pembangunan dan pengembangan sehingga operasional pelabuhan belum dapat dilaksanakan secara optimal. Sarana tersebut meliputi Belum dapat dipakainya dermaga pier 2 yang diperuntukkan bagi kapal berukuran > 30 GT karena masih dalam proses pembangunan; Terjadinya sedimentasi pada kolam labuh terutama pada sisi sebelah timur karena banyak digunakan untuk area perbaikan kapal sementara; Belum tersedianya fasilitas *docking* kapal.

Upaya penanganan masalah:

Kapal berukuran > 30 GT sementara ditambatkan di pier 1 berdampingan dengan kapal < 30 GT; Menyarankan segera dilakukannya pengerukan (*Dredging*) ulang pada lokasi yang mengalami sedimentasi; Menyarankan percepatan pembangunan fasilitas *docking* di lokasi yang telah ditentukan pada pihak penyewa aset.

- ❖ Besarnya gelombang dan arus yang masuk ke kolam labuh terutama jika terjadi angin slawung yang berkecepatan > 30 knot.

Upaya penanganan masalah:

Sementara menyarankan kapal berukuran kecil untuk tambat di Pelabuhan Tanjung Tembaga sampai pier 2 yang diharapkan bisa mengurangi dampak gelombang dan arus dalam kolam labuh selesai dibangun.

- ❖ Kurangnya SDM/karyawan yang berkompentensi sesuai dengan kebutuhan kerja seperti Nautika, permesinan dan pembinaan mutu.

Upaya penanganan masalah:

Untuk mengoptimalkan Pelabuhan Perikanan dalam hal Pelaksanaan SOP, maka dalam tahun 2010 Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan mengangkat Tenaga Sukwan sebanyak 6 (enam) orang, diluar tambahan tenaga yang berasal dari *Outsourcing* sebanyak 5 (lima) orang.

- ❖ Kurangnya kesadaran masyarakat nelayan untuk melengkapi persyaratan dokumen kapal/armada penangkapan ikan seperti Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), Surat Izin Berlayar (SIB), Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Laik Operasi (SLO) dan lain sebagainya.

Upaya penanganan masalah:

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan terus melakukan sosialisasi berkaitan dengan kelengkapan persyaratan yang dibutuhkan dalam kegiatan perikanan tangkap.

- ❖ Belum lengkapnya instansi yang ada di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan karena masih belum adanya hubungan kerjasama antar instansi.

Upaya penanganan masalah:

Perlu adanya koordinasi lagi dengan instansi terkait agar visi dan misi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan dapat terwujud.

- ❖ Adanya usaha dalam pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pelabuhan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan kegiatan operasional di lingkungan pelabuhan sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat membantu dalam kelancaran kegiatan perikanan masyarakat nelayan dan pengguna jasa pelabuhan lainnya.

Upaya pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan didasarkan pada peran dan fungsi dari pelabuhan itu sendiri, diantaranya dengan melakukan penyuluhan tentang kelengkapan surat-surat izin yang diperlukan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut. Selain itu membuat sistem pengurusan surat-surat izin dalam melakukan pelayaran yang mudah agar nelayan dapat terpacu kesadarannya untuk mengurus surat-surat izin menangkap ikan di laut dengan cara membangun kantor administrasi pelabuhan yang baru, dimana kantor kesyahbandaran, Satuan Kerja Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dan Unit Pelaksana Pelabuhan Perikanan Pantai (UP4) Mayangan terletak dalam satu gedung, sehingga mempermudah para nelayan yang akan mengurus surat-surat izin yang diperlukan untuk melakukan kegiatan perikanan tangkap di laut. Hal ini dikarenakan rendahnya kesadaran dari nelayan sendiri yang masih banyak belum memiliki surat-surat izin untuk menangkap ikan di laut.

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.06/MEN/2007 jo Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.19/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan yang mengatur tentang fungsi dari pelabuhan perikanan maka perlu dilakukan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan yang belum ada agar peran dan fungsi pelabuhan dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Seperti fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang yang meliputi pabrik es, fasilitas *docking* (galangan) kapal, fasilitas bengkel kapal, pembangunan dermaga 2, dan melakukan pengerukan pada tempat yang mengalami sedimentasi. Hubungan kelembagaan dalam pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan juga harus ditingkatkan agar peran dan fungsi pelabuhan dapat berjalan dengan baik seperti hubungan kelembagaan dengan Dinas Kebersihan kota Probolinggo dalam menjaga kebersihan lingkungan pelabuhan, meningkatkan hubungan dengan pengusaha swasta dalam penggunaan fasilitas yang mendukung kegiatan perikanan tangkap di pelabuhan. UPTD pada Tempat Pelelangan Ikan (TPI) harus segera menerapkan sistem pelelangan murni pada hasil tangkapan nelayan agar harga tidak berasal dari juragan dengan satu tengkulak saja, sehingga harga jual ikan yang didapat oleh nelayan dapat maksimal. Selain itu untuk menjaga kebersihan di lingkungan pelabuhan maka harus memindahkan pasar sementara yang di bangun di dalam pelabuhan.

## 6. KESIMPULAN DAN SARAN

### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Mekanisme kerja dari Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan masih berjalan kurang baik karena mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.06/MEN/2007 jo Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.19/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan yang mengatur tentang fungsi dari pelabuhan perikanan harus ada instansi terkait yang meliputi UPT Pelabuhan Perikanan, Perum, Dinas Perikanan, Kesehatan Hewan, Kesehatan Pelabuhan, Imigrasi, Bea dan Cukai, Karantina Ikan, dan Polri. Sedangkan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan sendiri masih belum ada Kesehatan Hewan, Kesehatan Pelabuhan, Imigrasi, Bea dan Cukai, Karantina Ikan.

Mekanisme kerja dari kegiatan bongkar muat kapal yaitu pemilik (juragan darat) sebagai pemimpin dan membawahi juragan laut (nahkoda) sedangkan juragan laut/nahkoda membawahi 1 KKM/bagian mesin dan 6-8 anak buah kapal. setelah perahu berlabuh maka proses pembongkaran dilakukan oleh ABK. Setelah itu hasil ditaruh dikeranjang oleh manol/tenaga pengangkut diangkut dan ditimbang. Proses penimbangan ini diawasi langsung oleh perwakilan dari juragan darat (orang yang dipercaya langsung oleh pemilik kapal). Proses penimbangan dilakukan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Kenyataan yang terjadi di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Manyangan proses

penjualan hasil melaut tidak melalui pelelangan melainkan terjadi kesepakatan terlebih dahulu dengan pedagang/tengkulak sebelum berangkat melaut, sehingga hasil laut setelah dilakukan proses penimbangan langsung dibawa oleh pedagang/ tengkulak tersebut.

2. Peran pelabuhan sebagai pusat aktivitas produksi ikan sudah berjalan dengan baik, dari data yang diperoleh dari Unit Pelaksana Pelabuhan Perikanan Pantai (UP4) Mayangan jumlah ikan yang sudah diproduksi di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan sebanyak 11.427.173 kg selama tahun 2010. Selain itu peran sebagai pusat aktivitas distribusi juga sudah berjalan dengan baik. Hasil produksi ikan dari nelayan ini didistribusikan ke kota Probolinggo sendiri dan kota-kota disekitarnya seperti kota Malang, Surabaya, Tulungagung, Banyuwangi, Madura, dan Jember. Peran pelabuhan sebagai pusat kegiatan masyarakat nelayan sudah berjalan baik, mulai dari kegiatan bongkar muat kapal ikan, kegiatan jual beli ikan yang dilakukan di TPI, dan kegiatan pengepakan ikan yang akan dikirim keluar kota. dan fungsi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan dalam pengembangan kegiatan perikanan masyarakat nelayan meliputi:

- Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk kegiatan perikanan di lingkungan pelabuhan.
- Fungsi dari Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan masih belum optimal dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelabuhan perikanan karena masih ada beberapa fungsinya yang belum dilaksanakan

3. Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.06/MEN/2007 jo Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.19/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan yang mengatur tentang fungsi dari pelabuhan perikanan maka perlu dilakukan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan yang belum ada agar peran dan fungsi pelabuhan dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Seperti fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang yang meliputi pabrik es, fasilitas docking (galangan) kapal, fasilitas bengkel kapal, pembangunan dermaga 2, dan melakukan pengerukan pada tempat yang mengalami sedimentasi. Hubungan kelembagaan dalam pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan juga harus ditingkatkan agar peran dan fungsi pelabuhan dapat berjalan dengan baik seperti hubungan kelembagaan dengan Dinas Kebersihan kota Probolinggo dalam menjaga kebersihan lingkungan pelabuhan, meningkatkan hubungan dengan pengusaha swasta dalam penggunaan fasilitas yang mendukung kegiatan perikanan tangkap di pelabuhan. UPTD pada Tempat Pelelangan Ikan (TPI) harus segera menerapkan sistem pelelangan murni pada hasil tangkapan nelayan agar harga tidak berasal dari juragan dengan satu tengkulak saja, sehingga harga jual ikan yang didapat oleh nelayan dapat maksimal. Selain itu untuk menjaga kebersihan di lingkungan pelabuhan maka harus memindahkan pasar sementara yang di bangun di dalam pelabuhan.



## 6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan, maka dapat disarankan beberapa hal yaitu:

1. Perlu adanya peningkatan koordinasi dengan instansi terkait yang lebih baik agar pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan sesuai dengan yang tercantum didalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.06/MEN/2007 jo Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.19/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan yang mengatur tentang fungsi dari pelabuhan perikanan.
2. Mempercepat penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan agar kegiatan operasional pelabuhan dapat berjalan dengan optimal.
3. Perlu adanya peran serta masyarakat nelayan dalam menunjang kegiatan perikanan tangkap dalam hal mengurus kelengkapan surat izin yang diperlukan untuk menangkap ikan di laut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amirin, T. 1995. **Menyusun Rencana Penelitian** (Cetakan Ketiga). PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Djarwanto, P dan Subagyo, P. 1993. **Statistik Induktif**. BPFE- Yogyakarta. Yogyakarta.
- Faisal, Sanapiah, 1990. **Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasinya**. Yayasan Asah Asih Asuh. Malang.
- Fauzi, A. 2005. **Kebijakan Perikanan dan Kelautan Isu, Sintesis, dan Gagasan**, PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. *dalam* Astuti, W.T. 2009. **Peranan PPN Prigi Dalam Pengembangan Kegiatan Perikanan Pada MAsyarakat Nelayan di Pesisir Pantai Prigi, Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek**. Skripsi. Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya. Malang.
- Hasan, Iqbal. 2002. **Penelitian dan Aplikasinya**. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Lubis, E. 2000. **Pengantar Pelabuhan Perikanan, Laboratorium Pelabuhan Perikanan**. IPB. Bandung. *dalam* Thamrin, M. H. 2005. **Peranan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dalam Mendukung Pembangunan Sektor Perikanan Di Kabupaten Lamongan Jawa Timur, Skripsi**. Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya. Malang.
- Manullang, 1990. **Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia**. Rineka Cipta. Jakarta.
- Mardalis. 2008. **Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)** Edisi 1 Cetakan 10. Bumi Aksara. Jakarta
- Martinus, 2006. **Handout Mata Kuliah Pelabuhan Perikanan**. Fakultas Perikanan. Universitas Brawijaya. Malang.
- Marzuki. 2005. **Metodologi Riset. Fakultas Ekonomi UII**. Yogyakarta.
- Murdiyanto, B. 2004. **Pelabuhan Perikanan Fungsi, Fasilitas, Panduan Operasional, Antrian Kapal**, Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Primyastanto M, G. Subroto dan P. Adicita. 2005. **Perencanaan Bisnis (Bisnis Plan) Sebagai Aplikasi Ekonomi Perikanan**. Bahtera Press. Malang.

Singarimbun, M dan Effendi, S. 1989. **Metode Penelitian Survey** (Edisi Revisi). LP3ES. Jakarta.

Stephen, R dan Coulter Mary. 2004. **Management**. Dialih bahasakan oleh T. Hermaya. Edisi 7. Jilid Kesatu. Indeks. Jakarta.

Sudjarwo dan Basrowi. 2009. **Manajemen Penelitian Sosial**. CV. Mandar Maju. Bandung.

Sumarsono, 2003. **Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia Dan Ketenagakerjaan**. Graha Ilmu. Jember.

Vredenberg. 1985. **Teori dan Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial**. Gramedia. Jakarta.

[www.iinsolihin.wordpress.com](http://www.iinsolihin.wordpress.com). **Fungsi Pelabuhan Perikanan**. Di akses pada tanggal 26 februari 2011.

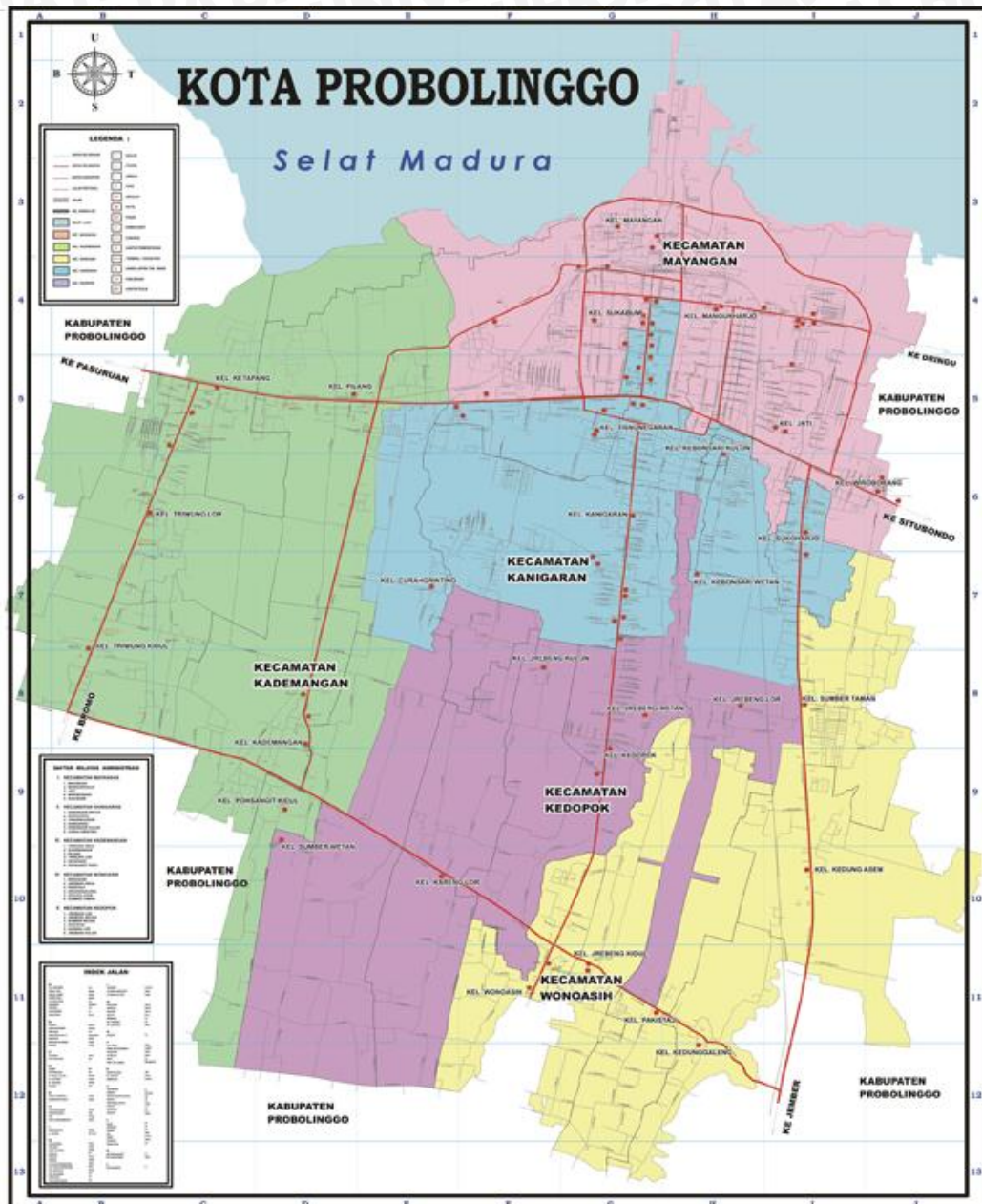
[www.probolinggokota.go.id](http://www.probolinggokota.go.id). **Profil Kota Probolinggo**. Di akses pada tanggal 26 februari 2011.

[www.anneahira.com](http://www.anneahira.com). **Pengertian dan Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia**. Di akses pada tanggal 28 februari 2011.

[www.focustraco.com](http://www.focustraco.com). **Pengertian Mekanisme dan Hubungan Kerja**. Di akses pada tanggal 28 februari 2011.

[www.kppu.go.id](http://www.kppu.go.id). **Pengertian Perikanan Tangkap**. Di akses pada tanggal 26 februari 2011.

## Lampiran 1. Peta Kota Probolinggo



## Lampiran 2. Peta Kelurahan Mangunharjo



### Lampiran 3. Layout Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan

